



BUPATI BENGKAYANG

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 45 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2011-2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah terpilih wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah, serta memuat kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat dengan memperhatikan RPJP Nasional.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2011-2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
23. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
24. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050 / 2020 / SJ Tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;
25. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 – 2013;
26. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2011-2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.
6. Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) adalah Rencana Pembangunan Nasional untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) adalah Rencana Pembangunan Kabupaten Bengkayang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
9. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) Tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah, adalah dokumen perencanaan periode 20 (duapuluh) tahun;
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Kebijakan adalah keputusan politik Kepala Daerah dalam rangka pelaksanaan visi dan misi pembangunan daerah.
14. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
15. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah rencana 5 (lima) tahunan yang menggambarkan visi, misi, analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta evaluasi kinerja.
16. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk mewujudkan visi Daerah.
17. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
18. Instansi Vertikal adalah perangkat Departemen dan/atau Lembaga Pemerintah Non Departemen di Daerah.
19. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan.

20. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode satu tahun.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2011-2015 yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah rencana pembangunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang yang selanjutnya disebut RTRWP adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang Kabupaten Bengkayang.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

RPJM Daerah merupakan:

- a. penjabaran visi, misi dan program Bupati ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Bupati, dan arah kebijakan keuangan Daerah, dengan mempertimbangkan RPJP Daerah;
- b. dokumen perencanaan Daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan Daerah dalam mewujudkan pembangunan Daerah yang berkesinambungan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penetapan RPJM Daerah adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam :
 - a. penyusunan RKPD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
 - b. penyusunan Renstra SKPD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
 - c. penyusunan Renja SKPD.
- (2) Tujuan penetapan RPJM Daerah adalah untuk :
 - a. menetapkan visi, misi dan program pembangunan jangka menengah Daerah;
 - b. menetapkan pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, dan Perencanaan Penganggaran;
 - c. mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten serta dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan.

BAB IV PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

Pasal 4

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 setiap tahun dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

- (2) Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan menjabarkan RPJMD ini ke dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) tahun 2011 – 2015 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Urusan.
- (3) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam setiap tahun dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan (Renja SKPD)

BAB V

SISTEMATIKA

Pasal 5

Sistematika RPJM Daerah terdiri dari beberapa bab, meliputi :

- a. **Bab 1 : Pendahuluan**
Bab ini berisi latar belakang penyusunan RPJMD, maksud dan tujuan penyusunan RPJMD, landasan hukum, uraian mengenai hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya serta penjelasan mengenai sistematika penulisan
- b. **Bab 2 : Gambaran Umum Kondisi Daerah**
Bab ini menguraikan tentang kondisi sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi daerah dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam bab ini juga dipaparkan prasarana dan sarana yang tersedia, politik, keamanan dan ketertiban, hukum dan aparat, wilayah dan tata ruang, serta sumberdaya alam dan lingkungan hidup
- c. **Bab 3 : Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan**
Bab ini berisi kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaannya. Dalam bab ini akan dibahas rencana sumber-sumber pendapatan daerah selama lima tahun mendatang dan alokasi belanja daerah yang bersifat indikatif
- d. **Bab 4 : Analisis Isu-isu Strategis**
Bab ini memaparkan analisa lingkungan eksternal berupa analisa peluang daerah dan analisa ancaman daerah; serta analisa lingkungan internal berupa analisa kekuatan daerah dan kelemahan daerah. Dalam bab ini juga dibahas tentang isu-isu strategis Kabupaten Bengkayang dalam lima tahun mendatang
- e. **Bab 5 : Visi, Misi, Agenda, Tujuan dan Sasaran**
Bab ini menjelaskan visi, misi, tujuan, dan sasaran berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Dalam bab ini juga dipaparkan sasaran utama pembangunan RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2011 – 2015
- f. **Bab 6 : Strategi dan Arah Kebijakan**
Bab ini menjelaskan tentang strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan setiap misi. Dalam bab ini juga dijelaskan tentang prioritas pembangunan daerah.
- g. **Bab 7 : Program Pembangunan Daerah**
Bab ini menjelaskan program pembangunan daerah untuk mewujudkan misi Kepala Daerah terpilih. Dalam bab ini program bidang pembangunan dikelompokkan menurut RPJP Nasional 2005 – 2025 yaitu 8 (delapan) bidang.

- h. Bab 8 : Kebutuhan Pendanaan**
Bab ini berisi tentang kebutuhan pendanaan yang dibutuhkan dalam mewujudkan misi selama lima tahun mendatang, yang bersumber dari APBD alokasi belanja langsung.
- i. Bab 9 : Penetapan Indikator Kinerja Daerah**
Bab ini menjelaskan indikator kinerja pembangunan yang merupakan tolok ukur pencapaian sasaran RPJMD serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.
- j. Bab 10 : Kaidah Pelaksanaan dan Pedoman Transisi**
Merupakan kaidah pelaksanaan berupa penegasan dalam menerapkan RPJMD dan program – program yang akan digunakan dalam masa transisi sebelum disusunnya RPJMD periode berikutnya
- k. Bab 11 : Penutup**

BAB VI

ISI DAN URAIAN RPJM DAERAH

Pasal 6

Isi beserta uraian RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan perencanaan pembangunan daerah, Kepala Daerah yang sedang menjabat pada tahun terakhir masa jabatannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode masa jabatan Kepala Daerah berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode masa jabatan Kepala Daerah berikutnya.

BAB IX

KETENTUAN LAIN –LAIN

Pasal 9

RPJM Daerah dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2011 – 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Bengkayang.

RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2011 – 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 10 Nopember 2010

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 17 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BENGKAYANG

TTD

Drs. KRISTIANUS ANWIM, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19560820 198503 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2010 NOMOR.....**45**

PENJELASAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 45 TAHUN 2010
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2011-2015

I. UMUM

RPJM Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD untuk setiap jangka waktu 1 (satu) tahun. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, RPJM Daerah merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Bupati, dan arah kebijakan keuangan Daerah, dengan berpedoman pada RPJMN 2010-2014 dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor... Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2011-2014.

RPJM Daerah tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD, yang merupakan rencana pembangunan tahunan Daerah, serta memuat prioritas pembangunan Daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Kurun waktu RPJM Daerah adalah 5 (lima) tahun. Pelaksanaan RPJM Daerah Tahun 2011-2015 terbagi dalam tahapan perencanaan pembangunan pada periodisasi perencanaan pembangunan tahunan yang dituangkan dalam :

- a. RKPD Tahun 2011;
- b. RKPD Tahun 2012;
- c. RPKD Tahun 2013;
- d. RKPD Tahun 2014;
- e. RKPD Tahun 2015.

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan RPJM Daerah, sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Pemerintah, serta pemangku kepentingan di Bengkayang.

Dalam rangka menjaga kontinuitas pembangunan dan menghindarkan kekosongan rencana pembangunan Daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) pada tahun pertama periode Pemerintahan Bupati berikutnya, yaitu pada tahun 2015. Namun demikian, Bupati terpilih pada periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan APBD melalui mekanisme perubahan APBD (APBD-P) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam Pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

RPJM Daerah mempunyai kedudukan sebagai kerangka dasar pengelolaan pembangunan Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran pembangunan Bengkayang dengan tetap memperhatikan arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan merupakan pedoman dalam:

- a. Penyusunan Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, dan perencanaan penganggaran;
- b. Penyusunan RPJM, Renstra SKPD, Renja SKPD, dan RKPD perencanaan penganggaran Kabupaten Bengkayang dan Kecamatan se Kabupaten Bengkayang;
- c. Mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu antara Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten serta Kabupaten/Kota yang berbatasan.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6 Ayat (1)

Cukup Jelas Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

**RENCANA TINDAK PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN
RPJMD KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2011 - 2015**

MISI 1 : *Membangun dan meningkatkan infrastruktur dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana*
BIDANG : Sarana dan Prasarana
SEKTOR

| NO | PROGRAM/KEGIATAN POKOK | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|--------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|---|-----------------------|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Pekerjaan Umum | | | | | | |
| 1 | Pembangunan Jalan dan Jembatan | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi wilayah, membuka daerah terisolir dalam rangka pemerataan ekonomi dan pembangunan guna tercapainya kesejahteraan masyarakat | Tersedianya prasarana jalan dan jembatan yang memadai menuju kecamatan terisolir dan menuju kawasan tertinggal sepanjang 326,150 Km, minimal dg kontruksi lapis pondasi atau perkerasan berbutir (Km) | 15,733.00 Km | 49,748.00 Km | 331,650.00 | Dinas Pekerjaan Umum |
| | - Pembangunan Jalan | - Tersedianya jalan yang mantap | Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik | 23.04% | 70% | | |
| | - Pembangunan Jembatan | - Tersedianya jembatan yang memadai | Persentase Kondisi Jembatan yang baik | 23.04% | 80% | | |
| 2 | Peningkatan jalan dan jembatan | Memperlancar arus transportasi, orang, barang dan jasa terutama pada ruas-ruas jalan strategis kabupaten guna peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah | Meningkatkan kualitas jalan Kabupaten yang telah berstatus dari kondisi rusak berat dan rusak sedang sebesar 80% berkurang menjadi 50% sehingga tersisa sebanyak 30% (km) | 117,700 Km | 1,177,000 Km | 353,100.00 | Dinas Pekerjaan Umum |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN POKOK | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Ruplah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|--|---|--|----------|-----------|---|-----------------------|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong | | | | | | Dinas Pekerjaan Umum |
| | - Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong | - Tersedianya saluran drainase/ gorong-gorong | - Persentase saluran/gorong gorong yang baik | % | % | | |
| 4 | Pembangunan Turap/Talud/Bronjong | | | | | | Dinas Pekerjaan Umum |
| | - Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong | - terbangunya turap/talud/ bronjong. | rasio turap/talud/bronjong terhadap aliran sungai/parit | % | % | | |
| 5 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Terpeliharanya jaringan jalan dan jembatan yg telah ada sehingga tetap memenuhi standar pelayanan minimal jalan yang meliputi aksesibilitas mobilitas dan keselamatan | | 6,579 Km | 65,791 Km | 9,869.00 | Dinas Pekerjaan Umum |
| | - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | - Terpeliharanya jalan dan jembatan | Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan | Km | Km | | |
| | | | Prosentase kondisi jalan yang baik | 23.04% | 70% | | |
| | | | Prosentase kondisi jembatan yang baik | 23.04% | 80% | | |
| 6 | Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan | | | | | | Dinas Pekerjaan Umum |
| | - Inspeksi kondisi jalan dan jembatan | - terciptanya sinkronisasi kondisi jalan dan jembatan. | Tingkat keakuratan kondisi jalan dan jembatan | % | % | 300 | |
| 7 | Tanggap Darurat jalan dan Jembatan | | | | | | Dinas Pekerjaan Umum |
| | - Rehabilitasi Jalan dalam Kondisi Tanggap Darurat | terciptanya kondisi jalan yang baik dan lancar. | Jumlah Kecamatan yg didata kondisi jalannya sehingga tepat dalam penanganannya | 3 Kec | 17 kec | 800 | |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN POKOK | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Ruplah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|---|--|--|---------|---------|---|-----------------------|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | - Rehabilitasi Jembatan dalam Kondisi Tanggap Darurat | terciptanya kondisi jembatan yang baik dan lancar. | Jumlah Kecamatan yg didata kondisi jembatannya shg tepat dalam penanganannya | 3 Kec | 17 kec | | |
| 8 | Pembangunan sistem Informasi/data base Jalan dan Jembatan | | | | | 750 | Dinas Pekerjaan Umum |
| | - Penyusunan Sistem Informasi/ Data Base Jalan dan Jembatan | - Tersedianya Sistem Informasi/ Data Base jalan dan Jembatan | Ada dan dapat Berfungsinya data base jalan dan jembatan | Ada | Ada | 500 | |
| 9 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmargaan | | | | | | Dinas Pekerjaan Umum |
| | - Pengadaan Alat-Alat Berat | - Tersedianya alat-alat berat | Jumlah alat berat yang akan dibeli | | | 8,950 | |
| | | 1. Stone Cruster | | 1 Unit | 1 Unit | | |
| | | 2. AMP | | | 1 Unit | | |
| | | 3. The Roller | | | 1 Unit | | |
| | | 4. Tree Wheel Roler | | | 1 Unit | | |
| | | 5. Aspal Sprayer | | | 1 Unit | | |
| | | 6. Asfalt Finisher | | | 1 Unit | | |
| | | 7. Dump Truk | | | 1 Unit | | |
| | | 8. Loader (Wheel) | | 1 Unit | | | |
| | | 9. Pemeliharaan sarana dan Prasarana kebinarmargaan | | 1 Unit | | | |
| | | | | 1 Paket | 1 Paket | 2,717 | |
| | - Rehabilitasi gedung Workshop | - Terpeliharanya gedung work shop | persentase bangunan work-shop yg digunakan. | % | 100% | | |
| | - Rehabilitasi pemeliharaan Alat-Alat Berat | - Tersedianya alat-alat berat | persentase alat-alat berat yang bisa digunakan | % | 100% | | |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN POKOK | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|--|---|---|-----------|-----------|---|-----------------------|
| | | | | 2011 5 | 2015 6 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 7 | 8 |
| 10 | Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya | | | | | | Dinas Pekerjaan Umum |
| | - Pembangunan jaringan air bersih/air minum | - Terciptanya jaringan air bersih/air minum. | persentase masyarakat yg menggunakan air bersih. | % | 80% | | |
| | - Pembangunan Reservoir | - Tersedianya Reservoir | Jumlah reservoir yang dibangun | Unit | Unit | | |
| | - Pembangunan pintu air | - Tersedianya pintu air | jumlah pintu air yg dibangun | Unit | Unit | | |
| | - Pelaksanaan normalisasi saluran sungai | terciptanya normalisasi saluran sungai. | persentase saluran sungai yang telah digunakan | % | % | | |
| | - Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun | teroptimalisasinya fungsi jaringan irigasi yg telah dibangun. | jumlah irigasi yang telah digunakan seoptimal mungkin. | Unit | Unit | | |
| 11 | Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku | | | | | | Dinas Pekerjaan Umum |
| | - Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa | Tersedianya prasarana pengambilan dan saluran pembawa | Jumlah prasarana air baku yang dapat digunakan masyarakat | Unit | Unit | | |
| | - Pemeliharaan prasarana pengambilan dan saluran pembawa | - Terpeliharanya prasarana pengambilan saluran pembawa | persentase prasarana pengambilan dan saluran pembawa | % | % | | |
| | - Peningkatan distribusi penyediaan air baku | - Terdistribusinya air baku | Jumlah desa/dusun yang terjangkau air baku | Desa | 100 Desa | | |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN POKOK | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|--|--|---|----------|----------|---|-----------------------|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | Pengembangan Kinerja Pengelolaan air Minum dan air limbah | | | | | | Dinas Pekerjaan Umum |
| | - Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat ber-penghasilan rendah | - Tersedianya prasarana dan sarana air minum bagi masy | Jumlah desa/dusun yang mendapat sarana prasarana air minum | Desa | 100 Desa | | |
| | - Pengembangan sistem distribusi air minum | - Terpenuhinya sistem distribusi air minum | Jumlah desa/dusun yang mendapat sarana prasarana air minum | Desa | 100 Desa | | Dinas Pekerjaan Umum |
| | - Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana prasarana air minum | - Terpeliharanya sarana prasa-air minum secara berkala | Persentase sarana prasarana air minum yang layak pakai | % | % | | |
| 13 | Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh | | | | | | Dinas Pekerjaan Umum |
| | - Pembangunan /peningkatan infrastruktur. | - Terbangunnya infrastruktur di wilayah strategis dan cepat tumbuh | Jumlah infrastruktur yang dibangun di wilayah strategis dan dapat digunakan dg baik | ... Unit | ... Unit | | |
| 14 | Pembangunan infrastruktur perdesaan | | | | | | Dinas Pekerjaan Umum |
| | - Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan | - Tertatanya lingkungan pe-kiman penduduk perdesaan. | Persentase permukiman yg sehat dan layak huni | 50% | 80% | | |
| | - Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan | - Terbangunnya jalan dan jembatan perdesaan | Panjang Jalan desa dengan kondisi baik | Km | Km | | Dinas Pekerjaan Umum |
| | - Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan | - Terbangunnya sarana dan prasarana air bersih perdesaan. | Jumlah desa/dusun yang mendapat sarana prasarana air bersih | Desa | 100 Desa | | Dinas Pekerjaan Umum |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN POKOK | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Ruplah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|--|--|--|---------|--------|---|--|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Perhubungan | | | | | | |
| 15 | Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan | | | | | | Dinas Perhubungan telomunikasi dan informatika |
| | - Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan | - Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan | Adanya Dokumen perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan | Bim Ada | Ada | | |
| | - Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan (alat-alat pengujian kendaraan bermotor) | - Tersedianya prasarana dan fasilitas perhubungan (alat-alat pengujian kendaraan bermotor) | jumlah bangunan dan fasilitas perhubungan (alat - alat pengujian kendaraan bermotor) | 0 Unit | 2 Unit | | |
| 16 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ | | | | | | Dinas Perhubungan telomunikasi dan informatika |
| | - Rehabilitasi/pemeliharaan terminal | - Terpelihara prasarana dan fasilitas LLAJ | Persentase terminal yang baik | 70% | % | | |
| | - Rehabilitasi/pemeliharaan pelabuhan | - Terpeliharanya pelabuhan di | jumlah pelabuhan yang digunakan atau difungsikan. | % | % | | |
| 17 | Peningkatan Pelayanan Angkutan | | | | | | Dinas Perhubungan telomunikasi dan informatika |
| | - Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang | - Terlaksananya pengujian sarana transportasi guna keselamatan penumpang | Jumlah sarana transportasi yang layak jalan | | | | |
| | - Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan | - Terpenuhinya pelayanan angkutan | - Tingkat pemenuhan kebutuhan alat transportasi darat | % | % | | |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN POKOK | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|---|--|--|--------|------|---|------------------------------|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | - Tingkat pemenuhan kebutuhan alat transportasi laut sungai dan penyebrangan | % | % | | |
| | | | - Tingkat pemenuhan kebutuhan alat transportasi udara | % | % | | |
| | | | - Tingkat pelanggaran ijin trayek | % | % | | |
| | - Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan | - Terbangunnya sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan. | jumlah sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan. | Unit | Unit | | |
| 18 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan | - Tersedianya sarana dan Prasarana Perhubungan | Tingkat pemenuhan sarana prasarana transportasi | | | | Dinas Perhubungan |
| | - Pembangunan gedung terminal | - Terbangunnya gedung terminal | jumlah gedung terminal | Unit | Unit | | telomunikasi dan informatika |
| | - Pembangunan halte bus | - Terbangunnya halte bus. | jumlah halte bus | Unit | Unit | | |
| 19 | Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas | - Tersedianya fasilitas pengamanan lalu lintas | | | | | |
| | - Pengadaan rambu-rambu lalu lintas | - Terpasangnya rambu lalulintas di lokasi yang tepat | Jumlah rambu lalulintas yang ada | Unit | Unit | | Dinas Perhubungan |
| | - Pengadaan Marka jalan | - Ada marka jalan ditempat yang tepat | Jumlah Marka Jalan yang terpasang | Buah | Buah | | telomunikasi dan informatika |
| | - Pengadaan pagar pengaman jalan | - Terbangunnya pagar pengaman jalan. | persentase terbangunnya pagar pengaman jalan. | % | % | | |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN POKOK | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|--|--|---|---------|--------|---|------------------------------|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 20 | Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor | | | | | | Dinas Perhubungan |
| | - Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor | - Terbangunnya tempat pengujian kendaraan bermotor. | Jumlah balai pengujian kendaraan bermotor | Unit | 1 Unit | | telomunikasi dan informatika |
| | - Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor | - Terbangunnya alat pengujian kendaraan bermotor. | Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor | Unit | 1 Unit | | |
| | Kehutanan | | | | | | |
| 21 | Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan | | | | | | |
| | - Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan | - Terkoordinasinya lokasi pengembangan ketenagalistrikan | Tingkat kesesuaian pembangunan Bid Kelistrikan dg Rencana Tata Ruang yg ada | % | % | | Dinas Pertamb Energi dan SDM |
| | Komunikasi dan Informasi | | | | | | |
| 22 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa. | | | | | | |
| | - Pembinaan dan Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi. | - Terpasangnya jaringan komunikasi dan informasi. | Tingkat kecukupan alat untuk jaringan komunikasi | % | % | | Sekretariat Daerah |
| | - Pembinaan dan Pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi | - Tersedianya sumberdaya untuk komunikasi dan informasi | Jumlah SDM yang tersedia dibidang informasi. | Org | Org | | Sekretariat Daerah |
| | - Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi. | - Tersedianya kebijakan komunikasi dan informasi. | Adanya regulasi tentang pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi | Blm Ada | Ada | | Sekretariat Daerah |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN POKOK | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|---|--|---|---------|----------|---|-----------------------|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 23 | Pengembangan Perumahan | | | | | | |
| | - Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan | - Tersedianya kebijakan, strategi dan program perumahan | Kesesuaian pembangunan perumahan dg kebijakan dan strategi pemerintah | % | % | | Dinas Pekerjaan Umum |
| | - Fasilitasi dan simulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu | - Terfasilitasinya pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu | Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni | 50% | 20% | | Dinas Pekerjaan Umum |
| | - Pembangunan sarana dan prasarana rumah sehat | - Tersedianya rumah sehat memadai | Persentase keluarga yang menghuni rumah sehat | 50% | 80% | | Dinas Pekerjaan Umum |
| | Perumahan | | | | | | |
| 24 | Lingkungan Sehat Perumahan | | | | | | |
| | - Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan | - Terlaksananya koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan | Persentase rumah tangga yg berperilaku hidup sehat | 43% | 80% | | Dinas Pekerjaan Umum |
| | - Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi Masyarakat Miskin | - Tersedianya air bersih dan sanitasi dasar | Cakupan pelayanan air bersih ke desa-desa | 61 Desa | 100 Desa | | |
| | - Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang | - Tersedianya kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang | Tingkat keserasian kawasan dan hunian berimbang | % | % | | |
| 25 | Pengelolaan areal pemakaman | | | | | | |
| | - Koordinasi pengelolaan areal pemakaman | - Terkelolanya areal pemakaman dengan baik | Kesesuaian lokasi pemakaman dg Rencana tata ruang | % | % | | Dinas Pekerjaan Umum |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN POKOK | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|---|--|--|--------|------|---|--|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | - Koordinasi penataan areal pembangunan perumahan | - Tertatanya areal pembangunan perumahan dengan baik | Kesesuaian areal pembangunan perumahan dg rencana tata ruang | % | % | | |
| | - Pemberian perijinan pemakaman | - Terfasilitasinya ijin pemakaman | Persentase pemakaman yg memperoleh ijin | % | % | | Kantor Perijinan dan Pelayanan Terpadu |
| 26 | Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh | | | | | | Dinas Pekerjaan Umum |
| | - Pembangunan/peningkatan infrastruktur | - Berkembangnya wilayah strategis dan cepat tumbuh | | % | % | | |

**RENCANA TINDAK PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN
RPJMD KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2011 - 2015**

MISI 1 : *Membangun dan meningkatkan infrastruktur dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana*
 BIDANG : Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
 SEKTOR :

| NO | PROGRAM/KEGIATAN POKOK | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|--|---|--|---------|---------|--|-------------------------------|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | Energi dan Sumberdaya Mineral | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan. | | | | | | |
| - | Pembinaan dan penyuluhan pertambangan Kab.Bengkayang | - Pengelolaan usaha pertambangan yg ramah lingkungan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku | Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan dampak kerusakan lingkungan akibat PETI | 220 Org | 800 Org | 450 | Dinas Pertambangan dan Energi |
| - | Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan mineral logam, non logam dan batuan | - Terawasinya pengusaha potensi sumber daya mineral untuk meningkatkan penerimaan negara sektor pertambangan dan PAD | Meningkatnya pengawasan perusahaan mineral dan hasil produksi pertambangan | 60% | 85% | 365 | Dinas Pertambangan dan Energi |
| - | Pendataan kerusakan lingkungan akibat pertambangan | Tersedianya data kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan | Menurunnya kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan | 60% | 85% | 135 | Dinas Pertambangan dan Energi |
| - | Kajian reklamasi daerah pasca tambang | Pengelolaan areal pasca tambang yang layak untuk dilakukan reklamasi | Meningkatnya reklamasi daerah pasca tambang yang berwawasan lingkungan | 55% | 75% | 695 | Dinas Pertambangan dan Energi |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN POKOK | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|---|--|---|---------|---------|--|-------------------------------|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan | | | | | | Dinas Pertambangan dan Energi |
| | - Pengawasan penertiban pertambangan rakyat. | Terlaksananya penertiban pertambangan rakyat. | Menurunnya persentase kerusakan lingkungan akibat pertambangan rakyat. | % | % | 250 | |
| | - Monitoring, evaluasi, dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat keg. Pertambangan rakyat | tercatatnya pelaporan dampak kerusakan akibat pertambangan rakyat. | | | | 250 | |
| 3 | Penyusunan regulasi dan sosialisasi pedoman teknis, data dasar dan perijinan pertambangan | | | | | | |
| | - Penyusunan PERDA bidang mineral, batubara, panas bumi dan air tanah | - Tersusunnya rancangan Perda usaha di bidang mineral, batu bara, panas bumi dan air tanah | Meningkatnya manajemen pembangunan pengelolaan mineral, batu bara, panas bumi dan air tanah | 1 Perda | 1 Perda | 330 | Dinas Pertambangan dan Energi |
| | - Pengadaan peta topografi digital Kab.Bengkayang | - Tersedianya peta dasar/peta bentang alam wilayah Kab. Bengkayang | Jumlah Kecamatan yang dipetakan | 0 | 17 Kec | 300 | Dinas Pertambangan dan Energi |
| 4 | Pembinaan dan Pengembangan bidang geologi dan SDM | | | | | | |
| | - Pemetaan daerah bidang geologi dan SDM | - Tersedianya peta potensi tambang, air tanah | Tersedianya data bidang geologi dan sumber daya mineral di Kab.Bengkayang | 3 Kec | 10 Kec | 2,000 | Dinas Pertambangan dan Energi |
| | - Pemetaan daerah prospek bahan galian industri | - Survey karakteristik dan kualitas bahan galian untuk pengembangan sektor industri | Tersedianya data potensi untuk sektor industri | 0 | 4 Kec | 800 | Dinas Pertambangan dan Energi |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN POKOK | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|--|---|--|-----------------------------|------------------------------|--|-------------------------------|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | Pembinaan dan pengawasan di bidang ketenagalistrikan | | | | | | |
| | - Pengadaan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) | - Pembangunan sumber ketenagalistrikan di daerah yang belum terjangkau aliran listrik | Bertambahnya pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) | 1 Unit | 5 Unit | 2,025 | Dinas Pertambangan dan Energi |
| | - Pengembangan dan penambahan jaringan listrik | - Pembangunan dan peningkatan jaringan listrik baru di kawasan permukiman masyarakat | Bertambahnya jaringan listrik | 4 Unit | 26 Unit | 16,000 | Dinas Pertambangan dan Energi |
| 6 | Pengembangan energi alternatif | | | | | | |
| | - Pembangunan dan penambahan pembangkit listrik : Tenaga Microhydro (PLTMH) Tenaga Surya Hybrid | - Terlaksananya pembangunan PLTMH di Lokasi yang layak PLTSurya di Lokasi yang layak PLTHybrid di Lokasi yang layak | Bertambahnya sumber penerangan bagi Masyarakat | 1 Unit 25 Unit 1 Unit | 5 Unit 155 Unit 5 Unit | 12,500 2,745 1,850 | Dinas Pertambangan dan Energi |
| | Kesatuan Bangsa & Politik Dalam Negeri | - | | | | | |
| 7 | Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam | | | | | | Badan |
| | - Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam. | Terdaftaranya daerah yang berpotensi terjadi bencana alam | Terpantaunya daerah yg berpotensi bencana di seluruh kecamatan | 17 Kec. | 17 Kec. | 850 | Penanggulangan Bencana Daerah |
| | - Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam. | Terbangunya tempat untuk penampungan /evakuasi | Tempat evakuasi yang memadai | 5 Unit | 25 Unit | 1,250 | |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN POKOK | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Ruplah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|---|---|---|--------|------|--|--------------------|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | - Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara. | Tersedianya logistik dan obat-obatan untuk persediaan akibat bencana alam | Kebutuhan logistik dan obat-obatan penduduk di tempat penampungan sementara terpenuhi | 100% | 100% | 3,750 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**RENCANA TINDAK PRIORITY BIDANG PEMBANGUNAN
RPJMD KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2011 - 2015**

MISI 1 : Membangun dan meningkatkan infrastruktur dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana.

BIDANG : Wilayah dan Tata Ruang

SEKTOR

| NO | PROGRAM/KEGIATAN POKOK | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Ruplah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|---|--|--|--------|------|---|-----------------------|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Penataan Ruang | | | | | | |
| 1 | Perencanaan Tata Ruang | | | | | | |
| | - Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL | - Tersedianya kebijakan ttg RDTRK, RTRK dan RTBL | Rasio areal/wilayah tata ruang Kab.Bengkayang yang se - suai dengan RDTRK, RTRK dan RTBL (%) | 50% | 80% | 600 | Bappeda |
| | - Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang | - Terlaksananya sosialisasi perundang-undangan tentang rencana tata ruang di setiap kecamatan dan ibu kota Kabupaten | Rasio areal/wilayah tata ruang Kab.Bengkayang yang se - suai dengan RDTRK, RTRK dan RTBL | 50% | 80% | 150 | Bappeda |
| | - Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata ruang | - Terkoordinasinya penetapan Ruang Kabupaten | Rasio areal/wilayah tata ruang Kab.Bengkayang yang se - suai dengan RDTRK, RTRK dan RTBL | 50% | 80% | 300 | Bappeda |
| | - Revisi rencana tata ruang | - Tersusunnya revisi tata ruang setiap 5 tahun sekali | Tingkat kesesuaian rencana tata ruang dg keadaan/kondisi ruang terbaru | 50% | 80% | 350 | Bappeda |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN POKOK | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|--|-------------------------------|-------------------------------|--------|------|---|-------------------------|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 2 | Pemanfaatan Ruang | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | - Penyusunan kebijakan pertinan | - Tersusunnya kebijakan per- | Tingkat kesesuaian pemanta- | % | % | 300 | Bappeda |
| | pemanfaatan ruang | ljinan pemanfaatan ruang | atan ruang dengan rencana | | | | |
| | | | tata ruang yang ada | | | | |
| | - Koordinasi dan fasilitasi penyusunan | - Terkoordinasinya dan terfa- | Tingkat kesesuaian pemanta- | % | % | 500 | Bappeda |
| | pemanfaatan ruang lintas kab/kota | silitasinya penyusunan | atan ruang dengan rencana | | | | |
| | | pemanfaatan ruang lintas | tata ruang yang ada | | | | |
| | | kab/kota | | | | | |
| 3 | Pengendalian banjir | | | | | | |
| | - Rehabilitasi dan pemeliharaan | - Pemanfaatan prasarana | Berkurangnya daerah/tempat | % | % | 12.500,00 | Dinas Pekerjaan Umum |
| | bantaran dan tanggul sungai | pengamanan pantai | Yang berpotensi banjir | | | | |
| | - Peningkatan pembersih dan | - Meningkatkan kebersihan | Berkurangnya daerah/sungai | % | % | | |
| | pengukuran sungai/kali | sungai/kali | Yang berpotensi banjir | | | | |
| | - Pembangunan prasarana pengaman | - terbangunnya prasarana | Berkurangnya daerah/tempat | % | % | | |
| | pantai | pengamanan pantai | Yang berpotensi banjir | | | | |
| | - Pembangunan tanggul pemecah | - terbangunnya tanggul | Berkurangnya daerah/tempat | % | % | | |
| | ombak | pemecah ombak | Yang berpotensi banjir | | | | |
| | Lingkungan Hidup | | | | | | |
| 4 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | | | | | | |
| | - Penyusunan kebijakan, norma-norma, | - Tersusunnya kebijakan, | Adanya Dokumen kebijakan, | Ada | Ada | 300 | Kantor Lingkungan Hidup |
| | standar, prosedur dan manual | norma-norma, standar, pro- | norma-norma standar, prose- | | | | |
| | pengelolaan RTH; | sedur dan manual pengelo- | dur dan manual pengelolaan | | | | |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Ruplah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|--|--|---|------------|------------|---|-----------------------------|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | - Pembinaan Keterkaitan produksi industri hulu hingga hilir; | terjalin hubungan produksi industri hulu hingga hilir | Berkembangnya industri yang ada dan meningkatnya jumlah indutri baru | buah | buah | | |
| 3 | Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial. | | | | | 250 | Dinas |
| | - Pembangunan akses transportasi sentra-sentra industri potensial; | terbangunnya akses transportasi sentra-sentra industri potensial; | Meningkatnya pendapatan / volume produksi industri potensial serta memperlancar arus barang | Rp Unit | Rp Unit | | Perindustrian & Perdagangan |
| | - Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat; | tersedianya sarana informasi yang mudah untuk diakses | | | | | |
| | Perdagangan | | | | | | |
| 4 | Perindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan | | | | | 750 | Dinas |
| | - Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa. | -Meningkatnya pengawasan terhadap barang dab jasa yang beredar. | -Jumlah Barang/jasa yang beredar dlm pengawasan (Jenis) | 8 | 45 | | Perindustrian & Perdagangan |
| | - Penyuluhan Perlindungan Kosumen. | - Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap hak kewajibannya sebagai konsumen | -Jumlah peserta penyuluhan perlindungan konsumen (orang) | 50 | 250 | | |
| | - Monitoring Harga Sembako dan Barang Strategis Lainnya. | - Meningkatnya Stabilitas harga sembako dan barang strategis lainnya. | -Persentase stabilitas harga (persen) | 75 | 100 | | |
| | - Pasar Murah. | -Terbantunya kebutuhan masyarakat kurang mampu | -Jumlah Masyarakat kurang mampu yg terbantu (orang) | 10,000 | 50,000 | | |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|---|--|---|---------------------|---------------------|---|-------------------------------|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan. | | | | | 375 | Dinas |
| | - Pembinaan organisasi kaki lima dan asongan. | terkoordinasinya organisasi kaki lima dan asongan | Persentase pedagang kaki lima yang memperoleh ijin dan membayar pajak | % | % | | Perindustrian & Perdagangan |
| | - Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan. | tersedianya lokasi tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan | Persentase pedagang kaki lima berdagang sesuai tempatnya | % | % | | |
| | Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | | | | | | |
| 8 | Penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif | | | | | 500 | Dinas |
| | - Penyusunan kebijakan tentang usaha kecil menengah | - Tersusunnya kebijakan ttg usaha kecil menengah yg dapat dilaksanakan | Jumlah kebijakan tentang Usaha kecil menengah | 2 Perda / Perbup | 6 Perda / Perbup | | Koperasi dan UMKM |
| | - Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah | - Terlaksananya sosialisasi kebijakan ttg usaha kecil menengah yg diikuti oleh seluruh usaha kecil menengah yg ada | Meningkatnya pengetahuan kebijakan tentang usaha kecil menengah | buah | 16.000 Bh | | |
| 9 | Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah | | | | | 1,000 | Dinas Koperasi dan UMKM |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|---|---|--|---|-----------------------|--|-------------------------|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 10 | Pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil menengah | - Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah | Terbitnya industri rumah tangga, industri kecil dan menengah | Peningkatan volume usaha | Rp 44,5 M | 1,000 | Dinas Koperasi dan UMKM |
| | | | | Penyempurnaan model-model usaha dan pengembangan koperasi | Rp 6,9 M | | |
| | | | | Penyempurnaan model-model pola pengembangan koperasi | Rp 6,9 M | | |
| | | | | Penyempurnaan model-model pola pengembangan koperasi | Rp 6,9 M | | |
| | | | | Penyempurnaan model-model pola pengembangan koperasi | Rp 6,9 M | | |
| | | | | Penyempurnaan model-model pola pengembangan koperasi | Rp 6,9 M | | |
| | | | | Penyempurnaan model-model pola pengembangan koperasi | Rp 6,9 M | | |
| | | | | Penyempurnaan model-model pola pengembangan koperasi | Rp 6,9 M | | |
| | | | | Penyempurnaan model-model pola pengembangan koperasi | Rp 6,9 M | | |
| | | | | Penyempurnaan model-model pola pengembangan koperasi | Rp 6,9 M | | |
| 11 | Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi | - Koordinasi pelaksanaan kegiatan dan pembangunan koperasi | sosialisasi kebijakan dan pembangunan koperasi | Peningkatan jml Koperasi yg baik dan bermutu | 286 Bh | 1,000 | Dinas Koperasi dan UMKM |
| | | | | Penyempurnaan model-model pola pengembangan koperasi | Rp 6,9 M | | |
| | | | | Penyempurnaan model-model pola pengembangan koperasi | Rp 6,9 M | | |
| | | | | Penyempurnaan model-model pola pengembangan koperasi | Rp 6,9 M | | |
| | | | | Penyempurnaan model-model pola pengembangan koperasi | Rp 6,9 M | | |
| | | | | Penyempurnaan model-model pola pengembangan koperasi | Rp 6,9 M | | |
| | | | | Penyempurnaan model-model pola pengembangan koperasi | Rp 6,9 M | | |
| | | | | Penyempurnaan model-model pola pengembangan koperasi | Rp 6,9 M | | |
| | | | | Penyempurnaan model-model pola pengembangan koperasi | Rp 6,9 M | | |
| | | | | Penyempurnaan model-model pola pengembangan koperasi | Rp 6,9 M | | |
| | - Pelatihan manajemen pengelola koperasi/UD | - Penyelenggaraan pelatihan kewirasahaan | teraksananya pelatihan kewirasahaan yg diikuti oleh masyarakat | Meningkatnya jumlah UMKM yang baik | 16.928 Bh | | |
| | | | | meningkatkan kualitas SDM dalam mengelola koperasi | | | |
| | | | | meningkatkan kualitas SDM dalam mengelola koperasi | | | |
| | | | | meningkatkan kualitas SDM dalam mengelola koperasi | | | |
| | | | | meningkatkan kualitas SDM dalam mengelola koperasi | | | |
| | | | | meningkatkan kualitas SDM dalam mengelola koperasi | | | |
| | | | | meningkatkan kualitas SDM dalam mengelola koperasi | | | |
| | | | | meningkatkan kualitas SDM dalam mengelola koperasi | | | |
| | | | | meningkatkan kualitas SDM dalam mengelola koperasi | | | |
| | | | | meningkatkan kualitas SDM dalam mengelola koperasi | | | |
| | - Pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil menengah | - Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah | Terbitnya industri rumah tangga, industri kecil dan menengah | Peningkatan volume usaha industri kecil dan menengah | Rp 44,5 M | 1,000 | Dinas Koperasi dan UMKM |
| | | | | Penyempurnaan model-model pola pengembangan koperasi | Rp 6,9 M | | |
| | | | | Penyempurnaan model-model pola pengembangan koperasi | Rp 6,9 M | | |
| | | | | Penyempurnaan model-model pola pengembangan koperasi | Rp 6,9 M | | |
| | | | | Penyempurnaan model-model pola pengembangan koperasi | Rp 6,9 M | | |
| | | | | Penyempurnaan model-model pola pengembangan koperasi | Rp 6,9 M | | |
| | | | | Penyempurnaan model-model pola pengembangan koperasi | Rp 6,9 M | | |
| | | | | Penyempurnaan model-model pola pengembangan koperasi | Rp 6,9 M | | |
| | - Penyelenggaraan pembinaan kewirasahaan | - Penyelenggaraan pelatihan kewirasahaan | teraksananya pelatihan kewirasahaan yg diikuti oleh masyarakat | Meningkatnya jumlah UMKM yang baik | 16.928 Bh | | |
| | | | | meningkatkan kualitas SDM dalam mengelola koperasi | | | |
| | | | | meningkatkan kualitas SDM dalam mengelola koperasi | | | |
| | | | | meningkatkan kualitas SDM dalam mengelola koperasi | | | |
| | | | | meningkatkan kualitas SDM dalam mengelola koperasi | | | |
| | | | | meningkatkan kualitas SDM dalam mengelola koperasi | | | |
| | | | | meningkatkan kualitas SDM dalam mengelola koperasi | | | |
| | | | | meningkatkan kualitas SDM dalam mengelola koperasi | | | |
| | | | bidang HAKI | terjalinya kerjasama di bidang HAKI | Peningkatan Mutu UMKM | | |
| | | | | | | | |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|---|---|---|-----------|------------------------|---|-------------------------------------|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | - Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi. | meningkatnya penerapan teknologi dan manajemen modern bagi jenis usaha koperasi. | Peningkatan volume usaha dan jumlah tenaga kerja di koperasi | Rp Org | Rp 6,9 M 22.993 Org | | |
| | Penanaman Modal Daerah | | | | | | |
| 12 | Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi. | | | | | | Ktr Perijinan dan Pelayanan Terpadu |
| | - Peningkatan kerjasama antar daerah bidang promosi dan informasi terkait perijinan bid. Investasi tingkat regional | - Terselenggaranya kerjasama Tingkat regional bidang investasi | Jumlah Kerjasama (Kerjasama) | 2 | 10 | 200 | |
| | - Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil, Menengah | - Terselenggaranya kerjasama tingkat regional bidang investasi | Jumlah Kerjasama (Kerjasama) | 1 | 5 | 375 | |
| | - Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal; | - Terlaksananya Penanaman Modal yg melibatkan dinas/badan/Instansi terkait dan investor | Jumlah rapat koordinasi/ rakornas/workshop investasi (Rapat/workshop) | 2 | 10 | 300 | |
| | - Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi | - Peningkatan pengetahuan dan kemampuan tentang penanaman modal bagi aparatur penyelenggaraan pelayanan investasi (Pegawai KKPPT) | - Jumlah Pegawai yg mengikuti Diklat PTSP | 4 | 20 | 180 | |
| | | | - Persentase pegawai yang mengikuti Diklat PTSP dan SPIPISE (%) | 20% | 100% | | |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|---|--|--|-----------|------------|---|---|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | - Penyelenggaraan pameran Investasi | - Tercapainya peningkatan Investasi melalui Promosi peluang investasi di Kab. Bengkayang (PMA/PMDN) | - Jumlah kegiatan pameran Investasi yg dilaksanakan (pameran/promosi) - Jumlah investor yg berin- vestasi di Kab. Bengkayang (Perusahaan) | 1 | 5 | 375 | |
| 13 | Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi. | | | | | | Ktr Perijinan dan Pelayanan Terpadu |
| | - Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) Pengembangan Penanaman Modal | - Tersedianya Master Plan Pengembangan Penanaman Modal | Masterplan pengembangan penanaman modal (buku) | 1 | 5 | 50 | |
| | - Pengembangan system Infor- masi penanaman modal | - Berkembangnya Sistem Penanaman Modal Berbasis Teknologi | Update Aplikasi dan data base Sistem pelayanan In- formasi Investasi dan perijin- nan secara elektronik | 1 | 5 | 125 | |
| | - Penyusunan system informasi penanaman Modal di daerah | - Tersusunnya sistem pena- naman modal berbasis teknologi | aplikasi sistem pelayanan informasi investasi dan per- ijinan investasi secara elek- tronok (Aplikasi) | 1 | - | 100 | |
| | - Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal | - terselesaikannya proses perijinan tepat waktu | Peningkatan PAD hasil retribusi | 6% | 30% | 240 | |
| 14 | Pengembangan pemasaran pariwisata | | | 6.500 org | 40.000 Org | 2,000 | Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga. |
| | - Peningkatan pemanfaatan tekno- logi informasi dalam pemasaran pariwisata | - Tersedianya situs sbg infor- masi obyek, jenis dan paket wisata unggulan daerah | Meningkatnya jumlah wisatawan yang datang | | | | |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|--|---|---|-----------|------------|---|---|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | - Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata | - Terjalannya kerjasama promosi pariwisata dg daerah lain | Meningkatnya jumlah wisatawan yang datang | | | | |
| | - Pelaksanaan promosi pariwisata di dalam dan di luar negeri | - Diikutinya even-even promosi pariwisata di dalam negeri | Meningkatnya jumlah wisatawan yang datang | | | | |
| 15 | Pengembangan Destinasi Pariwisata | | | 6.500 org | 40.000 Org | 2,000 | Dinas Kebudayaan |
| | - Pengembangan objek pariwisata unggulan; | - Berkembangnya tempat wisata unggulan | Meningkatnya jumlah wisatawan yang datang | | | | Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga. |
| | - Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata | - Tersedianya sarana dan prasarana di dan ke tempat wisata | Meningkatnya jumlah wisatawan yang datang | | | | |
| | - Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan; | - Dilaksanakannya jenis dan paket wisata unggulan daerah | Meningkatnya jumlah wisatawan yang datang | | | | |
| | - Pengembangan daerah tujuan wisata; | - Berkembangnya daerah tujuan wisata | Meningkatnya jumlah wisatawan yang datang | | | | |
| 16 | Pengembangan Kemitraan | | | 6.500 org | 40.000 Org | 500 | Dinas Kebudayaan |
| | - Pengembangan dan penguatan informasi dan database; | - Tersedianya situs sbg informasi obyek, jenis dan paket wisata unggulan daerah | Meningkatnya jumlah wisatawan yang datang | | | | Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga. |

**RENCANA TINDAK PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN
RPJMD KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2011 - 2015**

Misi 2 : *Mempercepat pembangunan ekonomi yang berkeadilan melalui pengembangan sektor unggulan*

BIDANG : Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|---|---|---|-----------|-----------|---|-----------------------|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Peningkatan kesejahteraan petani | | | | | | |
| | - Pelatihan petani dan pelaku agrobisnis. | - Terlaksananya pelatihan untuk petani dan pelaku agrobisnis | Pendapatan petani meningkat - Diikutinya pelatihan oleh gapoktan perkecamatan (Gapoktan) | 51 | 255 | 500 | BP2KP |
| | - Penyuluhan dan Pendampingan petani dan pelaku agribisnis | - Terlaksananya penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis | Penyuluh dan pendamping petani & pelaku agribisnis (Gapoktan) | 15 | 60 | 500 | BP2KP |
| | - Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani | - Meningkatkan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/ kelompok tani | tingkat kesejahteraan petani meningkat (%) | 30 | 60 | 500 | BP2KP |
| | - Peremajaan kebun | - terlaksananya peremajaan kebun karet yang sudah tua | luas kebun karet yang di-remajakan | 500 Ha | 2500 Ha | 2,500 | Dinas Hutbun |
| | - Bantuan bibit sawit | - terlaksananya bantuan bibit sawit ke masyarakat | luas kebun sawit yang mendapat bantuan bibit | 300 Ha | 1500 Ha | 2,310 | Dinas Hutbun |
| | - Pembangunan kebun rakyat | - Meningkatkan luasan kebun rakyat | Meningkatnya luasan kebun rakyat | 500 Ha | 2.890 Ha | 50,000 | |
| | a. Karet | | | | | | |
| | b. Kelapa Sawit | | | 12.134 Ha | 82.640 Ha | | Dinas Hutbun |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----------|--|--|--|---------|-----------|---|-----------------------|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | c. Kelapa Dalam | | | 25 Ha | 1.847 Ha | | Dinas Hutbun |
| | d. Kakao | | | 300 Ha | 1.490 Ha | | |
| | e. Lada | | | 500 Ha | 1370 Ha | | |
| | f. Kopi | | | 100 Ha | 100 Ha | | |
| | g. Cengkeh | | | | 35 Ha | | |
| | h. Kemiri | | | | 10 Ha | | |
| | i. Pinang | | | 5 Ha | 17 Ha | | |
| | j. Jarak | | | | 1713 Ha | | |
| | k. Tebu | | | | 32.000 Ha | | |
| 2 | Peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan) | | | | | | Dinas Pertanian |
| | - Penanganan daerah rawan pangan | - Meningkatnya penanganan daerah rawan pangan | - Peningkatan ketahanan pangan masyarakat | 40% | 100% | | Dinas Pertanian |
| | | - Tertanganinya daerah rawan pangan dan gizi | - Prosentase desa rawan pangan menurun | % | % | 500 | BP2KP |
| | - Penyusunan data base potensi produksi pangan | Tersusunnya data base potensi produksi pangan | dokumen database potensi produksi pangan (%) | 1 Dok | 1 Dok | 250 | Dinas Pertanian |
| | - Pengembangan desa mandiri pangan; | Terwujudnya kemandirian pangan rumah tangga miskin dan desa rawan pangan | Prosentase rumah tangga miskin dan desa rawan pangan menurun (%) | 75 | 15 | 500 | BP2KP |
| | - Pengembangan model distribusi yang efisien; | terciptanya model distribusi yang efisien; | waktu distribusi yang singkat; | hari | hari | 100 | Dinas Pertanian |
| | - Pengembangan sistem informasi pasar; | terciptanya sistem informasi pasar; | jumlah dan jenis media yang digunakan untuk informasi pasar; | 1 Media | 4 Media | | Dinas Pertanian |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|---|--|--|---------------------------------------|------------------------------------|---|-----------------------|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | - Peningkatan mutu dan keamanan pangan; | Meningkatnya mutu dan keamanan pangan; | rasio kemasan hasil produksi pertanian yang memenuhi syarat; | 20 | 40 | | BP2KP |
| | - Penelitian dan pengembangan sumberdaya pertanian; | Tersedianya acuan dlm pengembangan sumber daya pertanian | Jumlah rekomendasi teknologi pertanian tepat guna spesifikasi lokal | 8 | 40 | | Dinas Pertanian |
| | - Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian; | Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian; | - persentase kontribusi pertanian terhadap PDRB - Meningkat produktivitas pertanian (padi, jagung, dll) | 55% | 55% | | Dinas Pertanian |
| | - Penyuluhan sumber pangan alternatif; | Tertindakannya penyuluhan sumber pangan alternatif; | Jumlah dan jenis sumber pangan alternatif; | | | | BP2KP |
| | | | Frekwensi penyuluhan/ pembinaan kpd masy | 34 Kali | 170 Kali | | |
| | - peningkatan hasil produksi pertanian/perkebunan | - pembangunan jalan usaha tani perkebunan | Desa Mayak Desa Lembah Bawang Desa Lembang Desa Bengkulu | 750 mtr 1000 m 1000 m 1000 m | 2500m 3000m 3000 m 3000 m | | Dinas Hutbun |
| | - Pembuatan lumbung pangan desa | - Terbentuknya lumbung pangan deesa sehingga akses pangan tersedia | Prosentase desa yang memiliki lumbung pangan meningkat (%) | 10 | 50 | 750 | BP2KP |
| | - Pengembangan cadangan pangan desa | - Tersedianya cadangan pangan pokok di desa | Prosentase ketersediaan cadangan pangan pokok(%) | 30 | 60 | 500 | BP2KP |
| | - Optimalisasi pemanfaatan lahan perkarangan | - Termanfaatkannya lahan perkarangan untuk peningkatan gizi keluarga | Prosentase lahan perkarangan masy yang termanfaatkan | 30% | 75% | 500 | BP2KP |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|--|---|--|-------------|-------------|---|---|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | - Diversifikasi pangan pokok melalui Usaha Tani Terpadu | - Tersedianya sumber pangan alternatif berbasis sumber daya pangan lokal | Prosentase ketersediaan energi dan protein seimbang (AKP) seimbang Energi : Kilo gram/hari Protein : gram/hari | 2,200 50 | 2,500 57 | 500 | BP2KP |
| | - Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan dan Gizi (P2KPG) | - Tersedianya pangan dengan kandungan gizi seimbang (3B+A) | Prosentase Pola konsumsi skor Pola pangan harapan (PPH) meningkat (%) | 85 | 95 | 250 | BP2KP |
| | - Pengembangan pangan lokal | - Tersedianya pangan alternatif yg dapat mengurangi ketergantungan terhadap pangan pokok (beras) | Prosentase penurunan konsumsi pangan pokok (beras) dalam rumah tangga perkapita/tahun menurun (% / tahun) | 1 | 1.5 | 250 | BP2KP |
| 3 | Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan; | | | | | | Dinas |
| | - Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah; | terciptanya promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah | Meningkatnya permintaan hasil produksi pertanian/perkebunan (%) | 60 | 80 | 457 | Dinas Pertanian Dinas Hutbun BP2KP Dinas Perikanan |
| | - Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil pertanian/perkebunan masyarakat yang akan dipasarkan; | Terbangunnya pusat-pusat penampungan produksi hasil pertanian/perkebunan masyarakat yang akan dipasarkan; | Jumlah tempat penampungan produksi hasil pertanian yang tersedia; (Unit) | 0 | 3 | | |
| | - Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat; | Terciptanya informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat; | jumlah permintaan pasar atas hasil produksi pertanian masyarakat meningkat (%) | 60 | 80 | | |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----------|--|---|--|----------------|----------------|---|--|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | - Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanian/perkebunan yang akan dipasarkan; | Terlaksananya penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanian/perkebunan yg akan dipasarkan | Jml Komoditi yg dikemas yang memenuhi syarat | 5 | 30 | 134 | BP2KP |
| | - Penilaian usaha perkebunan | - Tersedianya data kualitas usaha perkebunan | Meningkatnya luasan kebun yang dinilai | 1000 Ha | 6000 Ha | 600 | Dinas Hutbun |
| | | | Persentase usaha kebun yang dinilai (%) | 20 | 100 | | |
| | - Pembinaan pembangunan perkebunan | - Terbinanya perkebunan | Persentase permasalahan perkebunan yang dapat diselesaikan dengan baik | 20 | 50 | 1000 | Dinas Hutbun |
| 4 | Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan ; | | | | | | Dinas Pertanian |
| | - Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna; | Terbangunnya sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna; | jumlah dan jenis sarana dan prasarana teknologi pertanian; (unit) | 2 15 100 | 2 75 500 | 200 579 | Dinas Hutbun BP2KP Dinas Pertanian |
| | - Pelatihan dan bantuan bibit | - Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan petani | Jumlah poktan yang dilatih | 1 Kip | 5 Kip | 125 | Dinas Hutbun |
| | | | Jumlah bantuan bibit | 90 Ha | 450 Ha | 1,890 | Dinas Hutbun |
| | - Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna; | Terlaksananya penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna; | Jumlah kelompok petani yang dibina; | 215 | 625 | | BPP&KP |
| | - Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna; | Meningkatnya SDM untuk bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna; | persentase penerapan teknologi pertanian bagi petani dalam berusaha tani (%) | 50 50 | 70 70 | 250 570 | Dinas Pertanian BP2KP |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|--|---|---|---------|-----------|---|-----------------------|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | - Pelatihan penerapan teknologi pertanian tepat guna | Terlaksananya pelatihan penerapan teknologi tepat guna sesuai rencana | - persentase penerapan teknologi tepat guna bagi petani dalam berusaha tani | 40 | 70 | 300 | Dinas Pertanian |
| | | | | 40 | 70 | 300 | BP2KP |
| | | | - Jumlah Kel tani yang ikut pelatihan (Kel) | 215 | 625 | | |
| | - Penyuluhan dan pendampingan penyuluh | - Terlaksananya pendampingan pada petani oleh petugas | Jumlah Penyuluh (swakarsa) tersedia untuk setiap desa | 90 | 124 | 488 | BP2KP |
| 5 | Peningkatan produksi pertanian/ perkebunan ; | | | | | | |
| | - Sertifikasi bibit unggul pertanian/ perkebunan . | Peningkatan sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan; | Jumlah bibit unggul yang tersertifikasi (ton) | | | | Dinas Pertanian |
| | | | - Padi (ton) | 20 | 60 | | Dinas Pertanian |
| | | | - Jagung (ton) | 10 | 30 | | Dinas Pertanian |
| | | | - Karet (batang) | 500,000 | 2,695,000 | | Din Hutbun |
| | - Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan; | Tersedianya sarana produksi pertanian/perkebunan; | Jumlah sarana produksi pertanian/perkebunan (Ha) | 5000 | 10000 | | Dinas Pertanian |
| | | | | 1000 | 5390 | | Din Hutbun |
| | - Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian; | Tersusunnya kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian; | Prosentase berkurangnya alih fungsi lahan pertanian pangan (%) | 10 | 15 | 250 | Dinas Pertanian |
| | - Pembangunan Jalan Usaha Tani Perkebunan | - Lancarnya transportasi dari dan ke lokasi perkebunan | | | | 1,092.50 | Dinas Hutbun |
| | | a. Desa mayak | | 750 M | 2500 M | | |
| | | b. Desa Lb.bawang | | 1000 M | 3000 M | | |
| | | c. Desa Bange | | 1000 M | 3000 M | | |
| | | d. Desa Kamuh | | 1000 M | 3000 M | | |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----------|--|--|--|--------|------|---|-----------------------|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | - Pengembangan kelapa sawit non revitalisasi | - Berkembangnya kelapa sawit non revitalisasi | | 200 Ha | 300 | 1,100 | Dinas Hutbun |
| | - Peremajaan Tanaman Karet | - Terlaksananya peremajaan karet | | 300 Ha | 1000 | 1,200 | Dinas Hutbun |
| | - Pembukaan lahan perkebunan | - Tersedianya lahan perkebunan baru untuk masyarakat | | 250 Ha | 1250 | 1,000 | Dinas Hutbun |
| 6 | Pemberdayaan penyuluhan pertanian/perkebunan; | | | | | | |
| | - Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan | meningkatnya kapasitas tenaga penyuluhan pertanian/ perkebunan; | jumlah penyuluh yang profesional | | | | BP2KP |
| | | | - Ahli | 10 | 20 | | |
| | | | - Terampil | 20 | 80 | | |
| | - Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan | Terlaksananya pembinaan bg pelaku utama dan pelaku usaha | Rasio pembinaan dg sistem lakususi (%) | 60 | 80 | 3,666 | BP2KP |
| 7 | Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak; | Terlaksananya pencegahan penanggulangan penyakit ternak | | | | | |
| | - Pendataan masalah peternakan | Terdatanya masalah peternakan | meningkatnya jumlah/ ternak yang sehat dan (%) | 60 | 80 | | Dinas Petanian |
| | - Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak; | Terpeliharanya kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak; | menurunnya angka kematian ternak (%) | 50 | 20 | | |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|--|--|---|--------|------|---|-----------------------|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | Peningkatan produksi hasil peternakan; | | | | | | |
| | - Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak | Terbangunnya sarana dan prasarana pembibitan ternak | jumlah sarana dan prasarana pembibitan ternak | 2 | 4 | | Dinas Pertanian |
| | - Pembibitan dan perawatan ternak; | Tersedianya bibit dan perawatan ternak; | -jumlah bibit yg dihasilkan | | | | Dinas Pertanian |
| | | | Sapi | 1000 | 3000 | | |
| | | | Babi | 2000 | 4000 | | |
| | - Pendistribusian bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat; | Terdistribusinya bibit ternak kepada masyarakat; | persentase tingkat terpenuhinya bibit ternak ke masyarakat; (%) | 80 | 90 | | Dinas Pertanian |
| | - Penyuluhan pengelolaan bibit yang didistribusikan kepada masyarakat; | Terlaksananya penyuluhan pengelolaan bibit yang didistribusikan kepada masyarakat; | Rasio kematian bibit ternak yg didistribusikan kpd masyarakat (%) | 30 | 5 | | BP2KP |
| | - Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak; | tersalurnya vaksin dan pakan ternak; | persentase ternak yang divaksin; | 50 | 70 | | Dinas Pertanian |
| | - Pengembangan agribisnis peternakan; | berkembangnya agribisnis peternakan; | tingkat pendapatan peternak meningkat | 50 | 70 | | Dinas Pertanian |
| | - Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan | Tersedianya hasil penelitian utk pengembangan produksi ternak | Produksi ternak meningkat (%) | | | 154 | BP2KP |
| 9 | Peningkatan penerapan teknologi peternakan ; | | | | | 200 | BP2KP |
| | - Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna | Berkembangnya teknologi peternakan tepat guna; | tingkat penerapan teknologi pertanian/perkebunan/perikanan | 30 | 60 | | |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|--|---|--|---------|---------|---|-----------------------|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | - Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna; | Meningkatnya pengetahuan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna; | persentase pengoperasian teknologi peternakan tepat guna; | 30 | 60 | | |
| 10 | Pemanfaatan potensi sumber daya hutan | | | | | | |
| | - Pengelolaan dan pemanfaatan kayu rakyat | - Tertibnya retribusi kayu rakyat | Luasan potensi kayu rakyat | 1000 ha | 5000 ha | 500 | |
| | - Fasilitasi kelompok penangkar bibit | - Tersedianya bibit kehutanan yang berkualitas | Meningkatnya kelompok penangkar bibit | 5 Klp | 25 Klp | 500 | |
| | - Pengembangan potensi HHBK | - Tergalinya potensi HHBK | Jumlah komoditas HHBK | 2 Kmdt | 6 Kmdt | 480 | |
| 11 | Rehabilitasi Hutan dan Lahan | | | | | | |
| | - Reboisasi hutan (dalam kawasan hutan) | - Terlaksananya reboisasi di lokasi yang tepat | Meningkatnya jumlah luasan hutan lindung | 116 Ha | 550 Ha | 1,100 | Dinas Hutbun |
| | - Penghijauan lingkungan | - Terlaksananya penghijauan lingkungan di daerah kritis | Jumlah luasan yang akan dihijaukan | 250 Ha | 1200 Ha | 2,400 | |
| | - Pengembangan hutan rakyat | - Terlaksananya penghijauan luar kawasan hutan | Jumlah luasan yang akan dihijaukan | 400 Ha | 2000 Ha | 4,000 | |
| | - Pembangunan aneka usaha kehutanan/kebun rotan | - Terbangunnya kebun rotan yang baik | meningkatnya luasan kebun rotan | 100 Ha | 500 Ha | 500 | |
| | - Penyediaan dan penanaman pohon jenis mangrove | - Tersedia dan tertanamnya mangrove di lokasi yang tepat | Meningkatnya luasan lokasi yang ditanami mangrove dan dapat tumbuh dengan baik | 33 Ha | 160 Ha | 480 | |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|---|---|---|----------|----------|---|-----------------------|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Hutan | | | | | | Dinas Hutbun |
| | - Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan | - Terlaksananya sosialisasi dan penyuluhan karhutla berupa penyebaran informasi(brosur) | Menurunnya persentase hutan yang terbakar (%) - Tersedianya alat... | 4,23 | 3 | 250 | |
| 13 | Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan | | | | | | Dinas Hutbun |
| | - Penertiban industri hasil hutan | tertibnya peredaran dan produksi hasil hutan | Jumlah permasalahan perkebunan yg dapat diselesaikan dg baik | 10 kali | 50 kali | 500 | |
| | - Perlindungan dan pengamanan hutan | terlaksananya perlindungan dan pengamanan hutan | Berkurangnya jumlah penebangan liar (kasus) | 5 | 0 | 500 | |
| 14 | Pemanfaatan Kawasan Hutan Industri | | | | | | Dinas Hutbun |
| | - Pemanfaatan kawasan hutan (Pemberdayaan masyarakat disekitar hutan berupa : - Pengelolaan Ulat Sutra - Pengelolaan Tanaman Gaharu | Terbinanya kelompok pengelola ulat sutera dan termanfaatkannya kawasan hutan dengan baik | Jumlah kelompok masyarakat yang mengelola ulat sutera meningkat | 1 Klp | 4 Klp | 440 | |
| | | | Meningkatnya luasan penanaman gaharu | 30 Ha | 150 Ha | 750 | |
| 15 | Perencanaan dan Pengembangan Hutan | | | | | | Dinas Hutbun |
| | - Pengembangan hutan masyarakat adat | Terlaksananya tata batas hutan dan pengukuhan hutan adat. - Hutan adat sekayok - Hutan adat Desa Kalon - Hutan adat Pangajit | persentase luas pemetaan hutan dan luas hutan adat yang dikukuhkan; ????? | 3 Lokasi | 3 Lokasi | 300 | |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Ruplah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|--|---|--|--------|------|---|------------------------------|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan | Bengkayang bebas ilegal, unreported unregulated(IUU) fishing serta kegiatan yang merusak SDKP | Prosentase wilayah pengelolaan perikanan bebas IUU fishing | 55% | 100% | 3,250 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | | | 60% | 100% | 150 | |
| | - Pengembangan perencanaan teknis,SDM pengawasan dan kelembagaan pengawasan | Terlaksananya perencanaan, pelaporan dan pengendalian terintegrasi dan tepat waktu | Persentase perencanaan, pengendalian dan pelaporan | 75% | 100% | 300 | |
| | - Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan | Terpenuhinya sarana dan prasarana pengawasan | Jumlah pemenuhan Sarana dan prasarana yang memadai terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu | | | | |
| | | | 1) Speedboat | 1 | 1 | 500 | |
| | | | 2)Dermaga | 1 | 10 | 1,000 | |
| | | | 3)Pos Pengawas | 2 | 5 | 1,000 | |
| | | | 4)Kapal pengawas | 0 | 1 | 100 | |
| | | | 5)Transmitter VMS | 0 | 1 | 150 | |
| | Pengembangan sistem pengawasan berbasis masyarakat(siswasmas) | Meningkatnya kesadaran pengawasan dari masyarakat | Jumlah pokwasmas | 1 | 5 | 250 | |
| | | | jumlah wilayah perairan bebas pengrusakan | 2 | 7 | 350 | |
| | Peningkatan penataan dan penegakan hukum dalam pemanfaatan SDKP | Meningkatnya pelaku tindak pidana dan menurunnya tindak pidana SDKP | jumlah kapal yang diperiksa | 10 | 100 | 150 | |
| 17 | Pengembangan Perikanan Budidaya | Meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam untuk Perikanan | jumlah sungai,pegung dan kolam baru | 21 | 1100 | | Dinas Kelautan dan Perikanan |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|---|--|---|--------|-------|---|------------------------------|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Peningkatan pemanfaatan aliran sungai dan rawa/pegung | - meningkatnya keramba dan restoking | jumlah keramba sungai dan restoking | 18 | 100 | 5,000 | |
| | Pengembangan kolam-kolam baru | - meningkatnya kolam-kolam baru | jumlah kolam baru | 3 | 1,000 | 3,500 | |
| 18 | Pengembangan Perikanan Tangkap | Terwujudnya stegier dan kapal jelajah tinggi | jumlah steger dan kapal | 8 | 50 | 7,000 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | Pengembangan Pembangunan Stegier dan tambatan kapal | Terpenuhinya stegie dan tambatan kapal | Jumlah stegier dan tambatar kapal | 8 | 20 | 4,000 | |
| | Pengembangan kapal nelayan | Terpenuhinya kapal jelajah tinggi | Jumlah kapal jelajah tinggi | 0 | 30 | 3,000 | |
| 19 | Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi | Terwujudnya pasar ikan, sarana prasarana Pengolahan dan volume produk olahan | Jumlah pasar, sarana pra-sarana dan volume produk | 9 | 50 | | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | Pengembangan dan peningkatan pasar ikan tradisional | Meningkatnya jumlah desa yang memiliki pasar ikan yg sehat | jumlah pasar ikan | 5 | 25 | 5,000 | |
| | Peningkatan sarana dan Prasarana Pengolahan hasil perikanan | Meningkatnya sarana dan prasarana pengolahan ikan | Jumlah sarana prasarana pengolahan ikan | 1 | 10 | 6,000 | |
| | | Meningkatnya Volome produk olahan ikan | jumlah sentra pengolahan | 3 | 15 | 750 | |
| 20 | Pengembangan kawasan budi daya air payau dan tawar | Meningkatnya Produksi Ikan | Produksi Budidaya ikan | 7,818 | 9,348 | | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | - Pengembangan budidaya ikan laut | Meningkatnya produksi ikan Laut | Produksi ikan Ikan Laut (ton) | 203 | 422 | 1,000 | |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|--|---|---|----------|-----------|---|------------------------------|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | - pengembangan budidaya ikan payau | Meningkatnya produksi ikan air payau | Produksi ikan air payau (ton) | 7,455 | 8,414 | 2,000 | |
| | - Pengembangan budidaya air tawar | Meningkatnya produksi ikan air tawar | Produksi ikan air Tawar (ton) | 160 | 512 | 5,000 | |
| 21 | Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Tangkap | Meningkatnya produktivitas perikanan tangkap dan kesejahteraan nelayan | jumlah produksi tangkap | 4,350 | 4,611 | | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | - Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang efisien, tertib dan berkelanjutan | Meningkatnya pelayanan prima dan tertibnya usaha perikanan tangkap sesuai SDI | Jumlah keabsahan dan dokumen usaha | 296 SIUP | 400 SIUP | 100 | |
| | | | jumlah kapal penangkap dan jenis alat penangkap yang sesuai SDI di setiap WPP | 50 SIKPI | 200 SIKPI | 100 | |
| | - Pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan Skala Kecil | Jumlah kawasan potensi perikanan tangkap yang menjadi kawasan Minapolitan | Jumlah KUB Mandiri di kawasan Minapolitan | 0 | 12 | 1,200 | |
| | | | Jumlah Usaha perikanan Tangkap yang memenuhi kelayakan usaha | 0 | 5 | 100 | |
| | - Penyediaan peralatan tangkap nelayan | Terwujudnya alat tangkap ikan yang sesuai SNI | Jml perahu tanpa motor | 195 | 50 | | |
| | | | Jml perahu motor, tempel | 184 | 245 | 1,960 | |
| | | | Jml Kapal motor 3-5GT | 296 | 400 | 5,000 | |
| | | | Jml Pukat ikan | 1,000 | 8,000 | 3,600 | |
| | | | Jml Pukat Udang | 1,000 | 5,000 | 2,500 | |
| | | | Jml Bubu Karang | 1,200 | 6,000 | 1,800 | |
| | | | Jml bubu udang galah | 1,000 | 3,000 | 165 | |
| | | | GPS/FISfinder | 120 | 350 | 2,100 | |
| | | | Compressor | 20 | 200 | 1,000 | |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|---|--|--|--------|-----------|---|------------------------------|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 22 | Pengelolaan Sumber Daya Perikanan | Terkelolanya sumber daya perikanan budi daya | Jumlah Usaha Perikanan | 15 | 65 | | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | | | Jumlah Benih Unggul | 98,000 | 1,000,000 | | |
| | - Peningkatan BBI dan UPR | Terpenuhinya kebutuhan benih | Jumlah Induk Unggul | 15 | 75 | 150 | |
| | | | Jumlah benih unggul (Ekor) | 98,000 | 1,000,000 | 750 | |
| | - Pengembangan Sistem Usaha pembudidayaan ikan | Kawasan potensi perikanan budi daya menjadi kawasan MINAPOLITAN | Jumlah Usaha perikanan budidaya yang memperoleh SNI | 10 | 15 | 500 | |
| | | | Jumlah kelompok Usaha perikanan Budidaya | 5 | 50 | 5,000 | |
| 23 | Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Meningkatnya Penataan dan pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan | Jumlah kawasan pesisir yang tahan terhadap kerusakan lingkungan | 2 | 14 | | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | - Pengembangan sarana dan prasarana Pesisir dan Pulau-pulau kecil | Terkelolanya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil | jumlah luasan kawasan pesisir dan pulau pulau kecil rusak pulih kembali (Ha) | 60 | 1000 | 2,000 | |
| | - Pengembangan kawasan konservasi laut daerah | terkelolanya kawasan ekosistem terumbu karang, lamun, mangrove dan biota laut | Kawasan konservasi laut yang dikelola secara berkelanjutan (Ha) | 1,000 | 6,000 | 1,200 | |
| | - Pendayagunaan Pulau pulau kecil | Terwujudnya 4 pulau pulau kecil yang memiliki Infrastruktur memadai secara terintegrasi | Jumlah pulau kecil yang memiliki infrastruktur | 0 | 5 | 1,000 | |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Ruplah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|---|---|--|--------|------|---|-------------------------------|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. | | | | | | Kantor Lingkungan Hidup |
| | - Pemantauan kualitas Lingkungan. | - Tercapainya pemantauan kualitas lingkungan | Persentase Kerusakan tidak lingkungan tidak bertambah | | | 325 | |
| | - Koordinasi pengelolaan prokasih/superkasih | Terkoordinasinya pengelolaan prokasih/superkasih | Mengkatnya koordinasi pengelolaan prokasih/ | 20% | 100% | 125 | |
| | - Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan hidup | - Tertaksananya pengawasan kebijakan bidang lingkungan hidup di seluruh kecamatan | Kebijakan bidang lingkungan hidup dilaksanakan dengan benar di seluruh kecamatan | 20% | 100% | 225 | |
| | - Pengkajian Dampak Lingkungan | - Tersedianya dokumen hasil pengkajian dampak lingkungan yang dapat dijadikan referensi dalam pengendalian lingkungan | Adanya dokumen hasil kajian dampak lingkungan yang dapat dijadikan referensi dalam pengendalian lingk. | ada | ada | 125 | |
| | - Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) | | Persentase perusahaan yang memiliki AMDAL UKL dan UPL | 50% | 100% | 125 | |
| | - Koordinasi penyusunan AMDAL | - Terkoordinasinya penyusunan AMDAL | Persentase perusahaan yang memiliki AMDAL UKL dan UPL | 50% | 100% | 150 | |
| 25 | Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. | | | | | | Kantor Lingkungan Hidup |
| | - Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber - sumber air | - Tercapainya konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air | Meningkatnya konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air | 10% | 50% | 100 | |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|-----------|---|---|--|--------|--------|---|-------------------------|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | - Pengendalian kerusakan hutan dan lahan | - Terkendalinya kerusakan hutan dan lahan | Kerusakan hutan dan lahan tidak bertambah |% |% | 100 | |
| | - Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam | - Terlaksananya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam | Pemanfaatan sumber daya alam yang sesuai dengan peraturan yang ada | 20% | 100% | 125 | |
| | - Koordinasi pengelolaan konservasi sumber daya alam | - Tercapainya koordinasi pengelolaan sumber daya alam | Pengelolaan sumber daya alam yang sesuai dengan peraturan yang ada | 20% | 100% | 125 | |
| 26 | Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam. | | | | | | Kantor Lingkungan Hidup |
| | - Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk | - Terkelolanya dan terpeliharanya terumbu karang, mangrove padang lamun, esturia dan teluk | Persentase trumbu karang yang rusak | % | % | 750 | |
| | - Perencanaan dan penyusunan program pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup | - Tersusunnya perencanaan dan program pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup | Pembangunan lingkungan hidup sesuai dengan rencana | 50% | 100% | 110 | |
| | - Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA | - Meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA | Meningkatnya jumlah masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA | 20% | 80% | 300 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|---|--|---|--------|--------|---|-------------------------------|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 27 | Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. | | | | | | Kantor Lingkungan Hidup |
| | - Penyusunan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) | - Tersusunnya kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) | Adanya dokumen KLHS | | 1 Buku | 1,000 | |
| | - Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) | - Tersusunnya rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) | Tingkat kesesuaian pembangunan dengan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan | 20% | 100% | 750 | |
| | - Penyusunan kebijakan dan produk hukum lingkungan | - Tersedianya acuan dalam pengelolaan lingkungan | Menurunnya pelanggaran pengrusakan lingkungan | 20% | 100% | 500 | |
| | - Penilaian kecamatan dan kabupaten sehat/adipura | - | Meningkatnya kebersihan dan kesehatan lingkungan | 50% | 100% | 331 | |
| | - Koordinasi Penilaian Adiwiyata/ Green School | - Tertanamnya rasa cinta lingkungan sehat di kalangan siswa | Meningkatnya kepedulian sekolah terhadap lingkungan hidup | 50% | 100% | 331 | |
| | - Kalpataru | - Tercapainya peningkatan kreatifitas perseorangan atau kelompok masyarakat dalam peningkatan kepedulian terhadap lingkungan | Diperolehnya Kalpataru utk Kabupaten Bengkyang | | | 306 | |
| 28 | Peningkatan dan pengendalian polusi | | | | | | Kantor Lingkungan Hidup |
| | - Pengujian emisi kendaraan bermotor | - Tercapainya pengujian kendaraan bermotor | Persentase kendaraan bermotor yang diuji | 20% | 100% | 175 | |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|-----------|--|---|---|--------|--------|---|-----------------------|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | - Pengujian emisi kadar polusi limbah padat dan limbah cair | - Tercapainya pengujian emisi kadar polusi limbah padat dan limbah cair | | | | 326.65 | |
| | - Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi | - Tersedianya tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi | Jumlah tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi | 1 Unit | 1 Unit | 300 | |
| | - Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran | - Terlaksananya penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran yang diikuti oleh masyarakat rawan polusi dan pencemaran. | | | | 100 | |
| 29 | Pengendalian kebakaran hutan | | | | | | |
| | - Koordinasi pengendalian kebakaran hutan | - Tercapainya koordinasi pengendalian kebakaran hutan | Penurunan angka hot spot | 10% | 50% | 125 | |
| | Sosialisasi kebijakan kebakaran hutan | - Tersosialisasinya kebijakan kebakaran hutan | Penurunan angka hot spot | 10% | 50% | 225 | |

**RENCANA TINDAK PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN
RPJMD KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2011 - 2015**

Misi 2 : *Mempercepat pembangunan ekonomi yang berkeadilan melalui pengembangan sektor unggulan*

BIDANG : Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

SEKTOR : Perindustriaan

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|--|---|--|--------|------|---|----------------------------------|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi. | | | | | | Dinas |
| | - Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi | Meningkatnya kemampuan industri berbasis teknologi | Persentase Industri yang berbasis teknologi | % | % | 200 | Perindustrian dan Perdagangan |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**RENCANA TINDAK PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN
RPJMD KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2011 - 2015**

Misi 2 : *Mempercepat pembangunan ekonomi yang berkeadilan melalui pengembangan sektor unggulan*

BIDANG : Wilayah dan Tata Ruang

SEKTOR :

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|---|--|---|--------|------|--|--------------------|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh. | | | | | | Bappeda |
| | Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh. | - Terkoordinasinya rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh | frekuensi koordinasi yang dilakukan | 100% | 100% | 750 | |
| | Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. | - Tersusunnya rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh | tersedianya dokumen rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh | 100% | 100% | 1000 | |
| | Penyusunan peraturan zonasi kawasan strategis dan cepat tumbuh; | - Tersusunnya peraturan zonasi kawasan strategis dan cepat tumbuh | tersedianya peraturan zonasi kawasan strategis dan cepat tumbuh | 100% | 100% | 250 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**RENCANA TINDAK PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN
RPJMD KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2011 - 2015**

Misi 3 : Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan iman dan taqwa serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi

BIDANG : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
SEKTOR

| NO | PROGRAM/KEGIATAN POKOK | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----------|--|--|--|--------|------|---|--|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Kesatuan Bangsa dan politik dalam negeri | | | | | | |
| 1 | Pengembangan Wawasan Kebangsaan. | | | | | | |
| | - Peningkatan toleransi dan kerukunan antar umat beragama | - Difasilitasinya setiap kegiatan keagamaan. | Berkurangnya kericuhan pada saat kegiatan keagamaan dilaksanakan | 100% | 100% | 250 | Kantor Kesbang Pol dan Linmas |
| 2 | Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan; | | | | | | Kantor Kesbang Pol dan Linmas |
| | - Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan. | - Terfasilitasinya halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dim upaya peningkatan wawasan kebangsaan | Banyaknya kegiatan keagamaan yang dapat difasilitasi | 70% | 90% | 250 | |
| 3 | Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda. | | | | | 250 | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga |
| | - Penyusunan pedoman komunikasi, informasi, edukasi, dan advokasi tentang kepemimpinan pemuda; | - Tersedianya podoman komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi ttg kepemimpinan pemuda | Meningkatnya Jumlah Organisasi Pemuda | % | % | | |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN POKOK | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----------|--|--|---|--------|------|---|-----------------------|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | - Penyusunan rancangan pola kemitraan antarpemuda dengan masyarakat; | - Tersusunnya pedoman pola kemitraan antar pemuda dgn masyarakat | Meningkatnya Jumlah Kegiatan Pemuda | % | % | | |
| | - Perumusan kebijakan kewirausahaan bagi pemuda ketaqwaan kepemudaan | - Tersusunnya kebijakan ke-wirausahaan bg pemuda | Meningkatnya Jumlah Kegiatan Pemuda | % | % | | |
| | Pendidikan | | | | | | |
| 4 | Pelayanan Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur | | | | | | Dinas Pendidikan |
| | - Penataan Lingkungan Mess Guru dan Kantor Dinas Pendidikan | - Terpeliharanya gedung kantor | Tersedianya sarana kerja yang representatif | 68% | 90% | 160 | |
| | - Pengadaan komputer & Pemeliharaannya | - Tercapainya pengadaan peralatan komputer & pemeliharaannya | Meningkatnya sarana & prasarana kerja Dinas Pendidikan | 75% | 95% | 57 | |
| | - Pengadaan Mobil Operasional Dinas Pendidikan | - Tercapainya pengadaan peralatan kendaraan operasional Dinas | Tersedianya sarana kerja yang representatif | 85% | 95% | 250 | |
| | - Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4 | - Terpeliharanya kendaraan Dinas Operasional | Mempelancar aktivitas dan pelayanan pendidikan | 85% | 96% | 204 | |
| 5 | Pendidikan anak usia dini | | | | | | Dinas Pendidikan |
| | Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini | 150 kelompok belajar di 17 kecamatan di Kab.Bengkayang | Tercapainya penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini 17 Kec. di Kab.Bengkayang | 25% | 100% | 1,800 | |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN POKOK | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|--|---|---|--------|------|---|-----------------------|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | | | | | | Dinas Pendidikan |
| | - Pembangunan gedung sekolah | - Tersedianya gedung sekolah yang memadai | Rasio jumlah sekolah & usia sekolah dasar & usia SLTP | 68% | 98% | 14 M | |
| | - Penambahan ruang kelas sekolah | - Tersedianya ruang kelas sekolah yang memadai | Rasio murid & ruang kelas | 70% | 97% | 160 M | |
| | - Pembangunan perpustakaan sekolah; | - Tersedianya perpustakaan sekolah yang memadai | Persentase SD yang memiliki perpustakaan | 65% | 97% | 21 M | |
| | | | Persentase SLTP yang memiliki perpustakaan | 60% | 98% | 10,5 M | |
| | - Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah | - Tersedianya gedung sekolah yang memadai | TK, SD, SMP | 70% | 90% | 75 M | |
| | - Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah | - Tersedianya kelas yang memadai | TK, SD, SMP | 75% | 96% | 75 M | |
| | - Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah. | - Tersedianya kelas yang memadai | TK, SD, SMP | 78% | 98% | 36 M | |
| | - Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah | - Tersedianya bangunan yang memadai | TK, SD, SMP | 79% | 98% | 36 M | |
| | - Pelatihan kompetensi tenaga pendidik | - Tersedianya guru yang profesional | Guru SD, SMP | 60% | 89% | 1,5 M | |
| | - Pelatihan Penyusunan Kurikulum (KTSP) | - Tersedianya kurikulum yang memadai | TK, SD, SMP | 50% | 89% | 135 M | |
| | - Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis sekolah (MBS) di satuan Pendidikan Dasar | - Terlaksananya MBS di sekolah TK, SD, SMP | Terlaksananya MBS di TK, SD, SMP | 85% | 98% | 200 000 | |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN POKOK | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|--|---|--|--------|--------|---|-----------------------|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | - Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi | - Tersedianya sarana ICT di sekolah | TK, SD, SMP | 57% | 89% | 900 | |
| | - Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah. | - Tersedianya beasiswa bagi anak putus sekolah | Terlaksananya pendidikan wajar 9 Tahun | 50% | 70% | 500 | |
| | - Penyediaan beasiswa transisi penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar. | - Tersedianya beasiswa transisi sekolah terakreditasi | TK, SD, SMP | 60% | 97% | 5,05 M | |
| | - Penyelenggaraan Multi-Grade Teaching di daerah terpencil. | - Terlaksananya multigrade teaching di daerah terpencil | SD, SMP | 60% | 90% | 5 M | |
| | - Pendidikan Sekolah Dasar dan Pendidikan Menengah Pertama | - Tercapainya pemerataan akses SD/SDLB dan SMP/SMPLB bermutu di semua kecamatan | APM SD/SDLB/Paket A/Sederajat (%) | 96% | 97% | 500 | |
| | | | APM SMP/SMPLB/Paket A/ Sederajat (%) | 74% | 77% | 500 | |
| | | | APK SD/SDLB/Paket A/Sederajat (%) | 95% | 97% | 700 | |
| | | | APK SMP/SMPLB/Paket A/ Sederajat (%) | 53% | 55% | 600 | |
| | | | APS usia 7-12 tahun (%) | 79.26% | 82.64% | 500 | |
| | | | APS usia 13-15 tahun (%) | 52.69% | 54.72% | 500 | |
| | | | Jumlah Siswa SD/SDLB sasaran beasiswa miskin/BOS (Orang) | 70% | 90% | 6,12 M | |
| | | | Persentase SD memiliki Perpustakaan (%) | 20.72% | 80.72% | 20 M | |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN POKOK | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|---|--|---|--------|--------|---|-----------------------|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Persentase SMP yang memiliki Laboratorium MIPA (%) | 36.51% | 80.30% | 800 | |
| | | | Persentase SMP yang memiliki perpustakaan (%) | 82.54% | 88.54% | 10 M | |
| | | | Persentase SD memiliki sarana Komputer (%) | 57% | 89% | 3 M | |
| | | | Rata-rata kabupaten nilai UN SMP | 25.75% | 30.50% | 400 | |
| | | | Persentase komite sekolah yang berfungsi efektif (%) | 50% | 90% | 500 | |
| | - Sharing Program Biaya Operasional sekolah | - Siswa SD,SMP | Terpenuhinya Standar Pembiayaan Operasional Sekolah di Kabupaten Bengkayang | 60% | 80% | 17,500 | |
| | - Penyediaan Dana Pengembangan sekolah SD/MI, SMP/MTs | - Tersedianya dana pengembangan sekolah yang memadai | Terpenuhinya Dana pengembangan sekolah TK, SD, SMP | 60% | 80% | 50,000 | |
| | - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | - Terwujudnya monitoring, Evaluasi TK dan pendidikan ditingkat TK,SD, SMP | Terfaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan yang standar | 60% | 80% | 750 | |
| | - Penyelenggaraan UAN dan UAS SD/MI dan SMP/MTs | Terselenggaranya UAN dan SD SMP di Kabupaten Bengkayang | Terwujudnya tingkat kelulusan SD, di Kabupaten Bengkayang | 100% | 100% | 7,500 | |
| | - Penyediaan dana TK | - Tersedianya dana operasional TK Pembina, Satu Atap dan TK Swas di Kabupaten Bengkayang | Tersedianya Dana Operasional TK di Kabupaten Bengkayang | 60% | 90% | 5,080 | |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN POKOK | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----------|---|---|--|--------|------|---|-----------------------|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | - Lomba Penelitian Ilmiah Remaja SMP | - Siswa SD, SMP | Terlaksananya LPIR SD dan SMP | 75% | 90% | 2,500 | |
| | - Lomba festival Seni dan Budaya SD, SMP | - TK SD SMP | Terlaksananya Lomba Festival seni Budaya SD, SMP | 80% | 90% | 2,500 | |
| | - Lomba Ketrampilan Siswa SD, SMP | - SD, SMP | Terlaksananya Lomba Ketrampilan SD dan SMP | 80% | 90% | 2,500 | |
| | - Penyediaan Dana SMP Satu Atap | - SMP Satu Atap | Tersedianya dana pengembangan SMP satu Atap | 80% | 90% | 12,500 | |
| | - Subsidi Pengembangan SD-SN dan SMP | - SD-SN dan SMP-SN | Tersedianya dana pengembangan SD-SN, SMP-SN | 80% | 90% | 8,000 | |
| | - Sharing Subsidi Proses Belajar Mengajar (PBM) SD inti | - SD Inti dan Sub Rayon SMP | Tersedianya dana Sharing PBM di SD Inti dan Sub Rayon SMP | 80% | 90% | 51,5 M | |
| | - Penyelenggaraan Ujian Ulang SMP | - Peserta Ujian Ulang SMP | Terlaksananya Ujian Ulang SMP | 100% | 100% | 3,5 M | |
| 7 | Pendidikan Menengah | | | | | | |
| | - Pembangunan gedung sekolah | - Tersedianya gedung sekolah yang memadai | Rasio jumlah sekolah & usia sekolah menengah & usia SMA/SMK di 4 (empat) Kecamatan di Kabupaten Bengkayang | 80% | 95% | 900 | Dinas Pendidikan |
| | - Penambahan ruang kelas | - Tersedianya gedung sekolah yang memadai | Rasio murid & ruang kelas | 85% | 97% | 800 | |
| | - Pemeliharaan/berkala bangunan sekolah | - Terpeliharanya ruang kelas sekolah | Tercapainya pemeliharaan bangunan sekolah yang memadai | 87% | 98% | 1 M | |
| | - Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah. | - Terpeliharanya ruang kelas sekolah | Tercapainya pemeliharaan ruang kelas sekolah yang memadai | 88% | 90% | 1 M | |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN POKOK | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|---|--|--|--------|--------|---|-----------------------|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | - Rehabilitasi rutin/berkala bangunan sekolah. | - Tersedianya bangunan sekolah yang memadai | Tercapainya bangunan sekolah memadai | 89% | 95% | 900 | |
| | - Rehabilitasi ruang kelas sekolah. | - Terpeliharanya ruang kelas sekolah memadai | Persentase ruang kelas yang memadai | 88% | 90% | 900 | |
| | - Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik | - Tersedianya tenaga pendidik yang berkompeten | APM SMA/SMK/Paket C/Sederajat (%) | 27.37% | 28.47% | 10000 | |
| | - Penyediaan Beasiswa bagi Keluarga Tidak Mampu | - Tercapainya penyediaan beasiswa bagi keluarga yang tidak mampu | APK SMA/SMK/Paket C/Sederajat (%) | 40.59% | 42.53% | 700 | |
| | - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) | - Terwujudnya pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan sistem manajemen berbasis sekolah | Jumlah Siswa SMA/SMK sasaran beasiswa miskin/BOS (Orang) | 76% | 95% | 500 | |
| | | | Persentase SMA/SMK memiliki perpustakaan (%) se Kabupaten Bengkayang | 47.37% | 52.63% | 1000 | |
| | | | Persentase SMA/SMK memiliki Laboratorium MIPA (%) | 36.84% | 63.18% | 900 | |
| | | | Persentase SMA/SMK memiliki Sarana Komputer (%) | 53% | 90% | 900 | |
| | | | Rata-rata kabupaten nilai UN SMA/ | 34.56% | 63.18% | 800 | |
| | | | Persentase komite sekolah yang berfungsi efektif (%) | 60% | 90% | 700 | |
| | | | | | | | |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN POKOK | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Ruplah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|---|---|--|--------|------|---|-----------------------|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | - Pengembangan materi dasar belajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi | - Tercapainya pengembangan materi dasar belajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi & komunikasi | Persentase murid SD,SMP,SMA/SM yang dapat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (%) | 85% | 95% | 10000 | |
| | - Penyelenggaraan akreditasi sekolah | - Tercapainya penyelenggaraan akreditasi sekolah | Persentase akreditasi sekolah yang memenuhi standar nasional (%) | 70% | 90% | 650 | |
| | - Penyelenggaraan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) | - Terciptanya sekolah yang bermutu | Terwujudnya sekolah yang bermutu kreatif | 75% | 90% | 450 | |
| | - Penyelenggaraan Cerdas Cermat UUD 1945 dan TAP MPR tingkat SMA/SMK | - Terselenggaranya kegtn cerdas cermat UUD 1945 & TAP MPR SMA/SMK | Meningkatkan rasa pemahaman siswa/l tentang UUD 1945 & TAP MPR | 76% | 95% | 310 | |
| | - Penyelenggaraan Debat Bahasa Inggris SMA/SMK | - Terselenggaranya debat bahasa inggris tingkat SMA/SMK | Meningkatnya minat bahasa Inggris untuk tingkat SMA/SMK | 70% | 89% | 250 | |
| | - Penyelenggaraan MGMP | - Terwujudnya ketrampilan dan pementapan guru mata pelajaran | Meningkatkan ketrampilan dan pementapan guru mata pelajaran | 75% | 90% | 450 | |
| | - Penunjang KBM SMK | | | | | | |
| | - Penyelenggaraan Olympiade Sain SMA | - Terselenggaranya olympiade sain tingkat SMA | Terwujudnya minat bagi siswa/siswi untuk bidang sains | 75% | 95% | 200 | |
| | - Penerimaan Siswa Baru (PSB) | | | | | | |
| | - Sosialisasi PMB Jalur Non Ujian Tertulis dan SPMB 2011-2015 | - Terlaksananya sosialisasi PMB jalur non ujian tertulis dan SPMB 2011-2015 | Terwujudnya rasa minat bagi siswa/siswi untuk melanjutkan studi kejenjang perguruan tinggi | 65% | 94% | 75 | |
| | - Penyelenggaraan UAN/UAS | - Terlaksananya penyelenggaraan UAN/UAS SMA/SMK | Tercapainya tingkat kelulusan UAS SMA/SMK di Kabupaten Bengkayang | 75% | 100% | 1,456 M | |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN POKOK | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|---|---|--|--------|------|---|-----------------------|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | - Peningkatan pelaksanaan BBE SMK (Life Skill) | - Terlaksananya BBE Life Skill tingkat SMK | Terciptanya BBE Life Skill untuk Tingkat SMK | 60% | 85% | 1,25 M | |
| | - Lomba ketrampilan siswa SMK | - Terlaksananya lomba ketrampilan siswa SMK | Terwujudnya kegiatan lomba Keterampilan siswa SMK | 90% | 98% | 325 | |
| | - Lomba Bela Negara SMK | - Terlaksananya lomba bela negara siswa SMK | Terwujudnya rasa berbangsa dan bermegara bagi siswa/i SMK | 95% | 95% | 125 | |
| | - Lomba Pidato Bahasa Inggris SMK | - Terlaksananya lomba pidato bahasa inggris tingkat SMK | Terwujudnya lomba pidato bahasa inggris tingkat SMK | 87% | 90% | 125 | |
| | - Lomba Kegiatan HARDIKNAS SMA/SMK | - Terwujudnya lomba HARDIKNAS SMA/SMK. | Terciptanya rasa cinta pendidikan tingkat SMA/SMK | 80% | 85% | 150 | |
| | - Lomba kegiatan bulan bahasa 28 Oktober SMA/SMK | - Terlaksananya lomba kegiatan bulan bahasa tingkat SMA/SMK | Terciptanya rasa cinta siswa/i terhadap bulan bahasa indonesia utk tingkat SMA/SMK | 75% | 80% | 150 | |
| | - Lomba kebersihan antar sekolah SMA/ SMK | - Terlaksananya lomba kebersihan antar sekolah tingkat SMA/SMK | Terwujudnya kebersihan disekolah SMA/SMK | 85% | 95% | 150 | |
| | - Pengembangan KTSP | - Terselenggaranya pengembangar penyusunan KTSP | Terwujudnya penyusunan KTSP sesuai dengan kebutuhan | 88% | 92% | 450 | |
| | - Penyelenggaraan Try Out UN | - Terselenggaranya Try Out UN tingkat SMA/SMK | Tercapainya tingkat kelulusan sesuai standar di Kab. Bengkayang | 50% | 65% | 300 | |
| | - Penyelengaraan Ujian Ulang SMA/SMK | - Terselenggaraanya ujian ulang tingkat SMA/SMK | Tercapainya tingkat kelulusan sesuai standar di Kab.Bengkayang | 40% | 60% | 75 | |
| | - Penyelenggaraan Ujian Akhir Semester dan Kenaikan Kelas | - Terselenggaraanya ujian akhir semester & kenaikan kelas untuk tingkat SMA/SMK | Meningkatkan persentase kenaikan siswa/siswi SMA/SMK di Kabupaten Bengkayang | 65% | 85% | 725 | |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN POKOK | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|---|---|---|--------|--------|---|-----------------------|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | - Penyelenggaraan Cerdas Cermat Bidang Studi | - Terselenggaranya cerdas cermat bidang studi tingkat SMA/SMK | Tercapainya tingkat kelulusan bidang studi sesuai standar di Kab.Bengkayang | 53% | 90% | 900 | |
| | - Penyediaan jaringan listrik & penyediaan pipa air bersih dan sanitasi | - Tersedianya jaringan listrik sekolah SMA/SMK | Terwujudnya proses pembelajaran yang memenuhi fasilitas listrik air bersih yang standar SMA/SMK di Kabupaten Bengkayang | 34.56% | 63.18% | 800 | |
| 8 | Peningkatan Pendidikan Non Formal | | | | | | Dinas Pendidikan |
| | - Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan | 10 Lembaga Kursus di Kabupaten Bengkayang | Meningkatnya penyelenggaraan kursus keterampilan di Kabupaten Bengkayang | 10% | 90% | 800 | |
| | - Pengembangan pendidikan keaksaraan fungsional (KF) | 500 kelompok yang meragukan 5.000 warga belajar | Terselenggaranya pendidikan keaksaraan fungsional di 17 Kecamatan di Kab.Bengkayang | 20% | 100% | 2,100 | |
| | - Penyelenggaran pendidikan kesetaraan | 25 Kelompok di 17 Kecamatan di Kabupaten Bengkayang | Tercapainya kesetaraan pendidikan di 17 Kecamatan di Kabupaten Bengkayang | 20% | 90% | 1,100 | |
| | - Penyelenggaran UNPK paket C | 15 Kelompok di 17 Kecamatan di Kabupaten Bengkayang | Terselenggaranya UNPK Paket C di Kabupaten Bengkayang | 20% | 100% | 250 | |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN POKOK | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|---|---|---|--------|------|---|-----------------------|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | - Penyelenggaraan UNPK paket A dan B | 75 Kelompok di 17 Kecamatan di - Kabupaten Bengkayang Kabupaten Bengkayang | Terselenggaranya UNPK Paket A dan B di Kabupaten Bengkayang Kabupaten Bengkayang | 15% | 90% | 390 | |
| | Penyelenggaraan Jambore PTK-PNF - Kabupaten Bengkayang Bengkayang | Seluruh Tenaga Pengajar PTK-PNF - Kabupaten Bengkayang Kabupaten Bengkayang | Terselenggaranya Jambore PTK-PNF Kabupaten Bengkayang Kabupaten Bengkayang | 20% | 100% | 300 | |
| | - Penyelenggaraan sosialisasi kurikulum KTSP pendidikan non formal | Tenaga Pendidik PTK-PNF se - Kabupaten Bengkayang | Terselenggaranya Sosialisasi dan Peningkatan Peningkatan Penguasaan Kurikulum Pendidikan Non Formal di Kabupaten Bengkayang | 50% | 90% | 550 | |
| 9 | Pengembangan dan Manajemen Olahraga Siswa | | | | | | Dinas Pendidikan |
| | - Olympiade Olahraga Siswa SD/FLSSN | Seluruh SD/MI di Kabupaten - Bengkayang | Meningkatnya Mutu Olahraga Siswa di tingkat SD | 95% | 100% | 750 | |
| | - Olympiade Olahraga Siswa SMP/FLSSN | Seluruh SMP/Mts di Kabupaten - Bengkayang | Meningkatnya Mutu Olahraga Siswa di Tingkat SMP | 95% | 100% | 750 | |
| | - Olympiade Olahraga Siswa SMA/FLSSN | Seluruh SMA/MA di Kabupaten - Bengkayang | Meningkatnya Mutu Olahraga Siswa di Tingkat SMA | 95% | 100% | 750 | |
| | - Olympiade Olahraga Siswa SMK/FLSSN | - Seluruh SMK di Kabupaten Bengk | Meningkatnya Mutu Olahraga Siswa di Tingkat SMK | 95% | 100% | 750 | |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN POKOK | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|---|---|---|--------|-------|---|-----------------------|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | - Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) | Seluruh Sekolah Sekabupaten - Bengkayang | Meningkatnya Mutu Olahraga Siswa di Kabupaten Bengkayang Kabupaten Bengkayang | 95% | 100% | 850 | |
| | - Liga Pendidikan Indonesia | Seluruh Sekolah Setingkat SMP dan SMA Sekabupaten - Bengkayang | Meningkatnya Mutu Olahraga Sepak bola Siswa di Kabupaten Bengkayang | 95% | 100% | 1,200 | |
| 10 | Peningkatan Peran Serta Kepemudaan | | | | | | Dinas Pendidikan |
| | - Seleksi Paskibraka | Meningkatnya kepedulian Bernegara Siswa Siswa | Siswa/1 dari seluruh sekolah setingkat SMA/SMK SMA/SMK | 95% | 100% | 600 | |
| | - Pelatihan Pembina/Pengurus OSIS | - Pembina dan Pengurus OSIS | Meningkatnya Disiplin Pelajar | 95% | 100% | 600 | |
| 11 | Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. | | | | | | Dinas Pendidikan |
| | - Pelaksanaan sertifikasi pendidik | - Meningkatkan profesionalitas tenaga pendidik | Terwujudnya guru yang profesional | | | | |
| | | - Guru TK | | 16.66 | 71.66 | | |
| | | - Guru SD | | 19.49 | 59.49 | | |
| | | - Guru SMP | | 29.93 | 69.93 | 1.8 M | |
| | | - Guru SMA | | 36.66 | 86.36 | | |
| | | - Guru SMK | | 54.79 | 79.79 | | |
| | | - Pengawas Sekolah | | 100 | 100 | | |
| | - Pendidikan lanjutan bagi pendidik utk memenuhi standar kompetensi | | | | | | |
| | a. Menyelenggarakan Ujian Program Pendas dan Non Pendas UT | - Mahasiswa UT Pendas dan non pendas | Tertindaknya Ujian Pendas dan Non Pendas dengan baik | 85 | 98 | | |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN POKOK | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|--|--|--|--------|-------|---|-----------------------|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | b. Memberi bimbingan registrasi Mahasiswa UT | - Mahasiswa UT Pendas dan non pendas | terlaksananya bimbingan Registrasi mahasiswa UT dengan baik | 87 | 95 | 1.5 M | |
| | c. Memberikan bimbingan UAS UT | - Mahasiswa UT Pendas dan | terlaksananya bimbingan UAS UT | 80 | 90 | | |
| | d. Menerima pendaftaran peserta Program Kependidikan S1 guru dalam jabatan | Non Pendas Guru yang belum S1 | terlaksananya penerimaan guru yang belum S1 untuk utk disampaikan ke FKIP UNTAN sebagai LPTK | 15.44 | 100 | | |
| | - Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga Kependidikan (P3TK) | | | | | | |
| | a. Proses pengadaan NUPTK | - Tenaga Pendidik dan Kependidikan PNS maupun Non PNS | Tenaga Pendidik dan Kependidikan PNS maupun Non PNS memiliki NU | 80 | 100 | | |
| | b. Pengumpulan data Individu guru PNS dan Non PNS | - Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang sudah bersertifikasi | terdatanya guru PNS dan Non PNS | 75 | 95 | 200 | |
| | c. Proses pengadaan NRG | | Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang sudah bersertifikasi memiliki NRG (Nomor Regiser Guru) | 90 | 100 | | |
| | - Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik | | | | | | |
| | a. Subsidi guru | | | | | | |
| | - Tunjangan guru daerah terpencil khusus | - guru di daerah terpencil khusus | Meningkatnya kesejahteraan guru di daerah terpencil khusus | 81.88 | 98 | 259.405 | |
| | - Tunjangan guru daerah perbatasan | - guru di daerah perbatasan | Meningkatnya kesejahteraan guru di daerah perbatasan | 57.9 | 82 | | |
| | - Tunjangan fungsional guru Non PNS | - guru Non PNS | Meningkatnya kesejahteraan guru Non PNS | 34.15 | 84.15 | | |
| | b. Proses Penetapan Angka Kredit (PAK) | | | | | | |
| | - PAK Kenaikan Pangkat | - guru PNS | terlaksananya kenaikan pangkat guru PNS | 80 | 90 | | |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN POKOK | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|---|--|--|--------|------|---|-----------------------|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | - PAK Perubahan Status CPNS ke PNS | - guru CPNS | terlaksananya perubahan status gu CPNS ke PNS | 100 | 100 | | |
| | c. Proses kenaikan gaji berkala | - guru PNS | terlaksananya kenaikan gaji berkala guru PNS | 100 | 100 | | |
| | - Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidikan dan tenaga kependidikan | | | | | | |
| | a. Pembekalan CPNS | - guru CPNS | Terbentuknya komitmen, disiplin, dan tanggungjawab CPNS dalam melaksanakan tugas | 43.5 | 68 | 71.42 | |
| | - Bantuan Beasiswa | | | | | | |
| | a. S1 Penjaskesrek UNTAN | | | | | | |
| | b. S1 (MIPA, Bahasa Inggris, kualifikasi tenaga pendidik) | Siswa yang berprestasi | Meningkatnya SDM Kabupaten Bengkayang | 90 | 100 | 34 M | |
| | c. S1 FMPIA UNTAN | | | | | | |
| | d. S1 UNY | | | | | | |
| | e. S1 KSDI-UI | | | | | | |
| | f. S1 BUD-IPB | | | | | | |
| 12 | Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. | | | | | | Kantor Kearsipan |
| | - Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar | Dilaksanakannya sosialisasi cinta membaca di seluruh kecamatan | Meningkatnya minat baca masyarakat | | | 250 | |
| | - Pengembangan minat dan budaya baca. | Dilaksanakannya sosialisasi cinta membaca di seluruh kecamatan | Meningkatnya minat baca masyarakat | | | 250 | |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN POKOK | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|---|--|--|--------|------|---|-----------------------|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | - Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat. | Dilaksanakannya pembinaan dan stimulasi pada setiap perpustakaan umum, khusus, dan | Persentase perpustakaan yang terbina di Kabupaten Bengkayang | | 80% | 500 | |
| | - Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah. | Diadakannya buku/bahan perpustakaan umum daerah yang terkini setiap tahun | Jumlah judul/bahan perpustakaan yang diadakan setiap tahun | | | 250 | |
| 13 | Program Manajemen Pelayanan Pendidikan | | | | | | Dinas Pendidikan |
| | - Penyelenggaraan Lomba Sekolah sehat | Seluruh Sekolah di Kabupaten Bengkayang | Meningkatnya Budaya Bersih dan Sehat pada Sekolah dari Seluruh Tingkatan di Kabupaten Bengkayang | 95% | 100% | 750 | |
| | - Penyelenggaraan Hardiknas dan seleksi guru berprestasi | - Seluruh Guru di Kabupaten Bengkayang | Meningkatnya Mutu Pendidik di Kabupaten Bengkayang | 95% | 100% | 600 | |
| | - Penyelenggaraan pelatihan guru olahraga | Guru Olahraga SD, SMP dan SMA di Kabupaten Bengkayang | Meningkatnya Manajemen Olahraga di Seluruh Tingkatan Sekolah di Kabupaten Bengkayang | 95% | 100% | 600 | |
| | | Kabupaten Bengkayang | seluruh tingkatan sekolah di Kabupaten Bengkayang | | | | |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN POKOK | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|--|--|---|--------|------|---|-----------------------|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | - Pelatihan Senam Kesegaran Jasmani (S | Guru Olahraga SD, SMP dan - SMA di Kabupaten Bengkayang Kabupaten Bengkayang | Termasyarakatnya SKJ di Kabupaten Bengkayang Bengkayang | 95% | 100% | 600 | |
| | - Penyelenggaraan pelatihan wasit/juri olahraga | Guru Olahraga SD, SMP dan SMA di Kabupaten Bengkayang | Meningkatnya Manajemen Olahraga di Seluruh Tingkatan Sekolah di Kabupaten Bengkayang seluruh tingkatan sekolah di Kabupaten Bengkayang | 95% | 100% | 600 | |
| | - Penyelenggaraan PORSENI guru | Guru Olahraga SD, SMP dan SMA di Kabupaten Bengkayang | Meningkatnya Manajemen Olahraga di Seluruh Tingkatan Sekolah di Kabupaten Bengkayang seluruh tingkatan sekolah di Kabupaten Bengkayang | 95% | 100% | 600 | |
| | - Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan. | - Terwujudnya hasil kinerja dibidang pendidikan yang optimal | Tercapainya evaluasi hasil kinerja b pendidikan | 78% | 90% | 400 | |
| | - Pembinaan dewan pendidikan | - Terwujudnya hasil kinerja bidang pendidikan yang optimal dan efisien | Tercapainya kinerja dewan pendidik yang profesional dan efektif | 50% | 95% | 500 | |
| | - Pembinaan Komite Sekolah | - Terwujudnya pembinaan komite sekolah | Tercapainya kinerja komite sekolah profesional | 65% | 98% | 600 | |
| | - Penerapan sistem informasi manajemen pendidikan | - Terwujudnya penerapan sistem manajemen pendidikan | Tercapainya sistem informasi mana pendidikan yang efektif | 70% | 97% | 700 | |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN POKOK | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|--|--|--|--------|--------|---|-----------------------|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | - Penyelenggaraan Bimtek supervisi akademik/manajerial | - Tercapainya pengawasan sekolah yang efektif dan berkesinambungan | Meningkatkan profesionalisme pendidik sekolah | 90% | 97% | 290 | |
| | - Pelaksanaan supervisi | - Tercapainya supervisi untuk tingkat SD, SMP, SMA, SMK | Terpenuhinya standar standar minimal pendidikan | 20% | 95% | 2.784 | |
| | - Penyelenggaraan pemilihan guru/kepala sekolah/tenaga pendidik berprestasi | - Tercapainya pemilihan guru/kepala sekolah yang berprestasi | Terpilihnya utusan kabupaten/kota provinsi/nasional | 90% | 95% | 250 | |
| | - Penyelenggaraan TOT guru mata pelajaran | - Tersedianya guru-guru inti mata pelajaran non UN | Terbentuknya MGMP/KKG mandiri berkelanjutan | 30% | 95% | 575 | |
| | - Penyelenggaraan penilaian kinerja kepala sekolah | - Terseleksinya kepala sekolah untuk tingkat TK, SD, SMP, SMK | Terpilihnya kepala sekolah yang profesional sesuai kebutuhan | 50% | 95% | 1.344 | |
| | Kesehatan | | | | | | |
| 14 | Program Obat dan Pembekalan Kesehatan | | | 2000 | 14.200 | | Dinas Kesehatan |
| | - Pengadaan obat dan pembekalan kesehatan | -Tersedianya obat -Meningkatnya pengetahuan kesehatan. | persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan | 90% | 100% | | |
| | - Peningkatan keterjangkauan harga obat dan pembekalan kesehatan terutama untuk penduduk miskin. | -Harga obat murah | persentase pengadaan obat esensial persentase pengadaan obat generik. | 90% | 100% | | |
| | - Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit. | Terciptanya mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit. | Persentase penulisan resep obat yg digunakan. | 90% | 100% | | |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN POKOK | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|--|--|---|--------|------|---|-----------------------|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | - Peningkatan mutu Penggunaan obat dan Perbekalan Kesehatan. | Terciptanya mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan. | Persentase mutu obat yang digunakan. | | | | |
| 15 | Upaya Kesehatan Masyarakat. | - Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar yang efektif dan efisien | Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja formal (%) | 55 | 82.5 | 3,500 | Dinas Kesehatan |
| | - Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya | | cakupan pelayanan kesehatan pra usia lanjut usia (%) | 60 | 90 | | |
| | - Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya | | Pelayanan gangguan jiwa disarana pelayanan kesehatan umum (%) | 10 | 15 | | |
| | - peningkatan pelayanan kesehatan dasar yang mencakup sekurang-kurangnya promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit menular dan pengobatan dasar. | | cakupan rawat jalan (%) | 15 | 22.5 | | |
| | | | cakupan rawat inap (%) | 2 | 4 | | |
| | | | persentase pukesmas ISO (%) | 3 | 12.5 | | |
| | | | Persentase pukesmas yg melaksanakan klinikal algoritma (%) | 59 | 70.8 | | |
| | - Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan | | persentase sarana yankes yang telah menerapkan PMK (%) | 14 | 16 | | |
| | | | Cek Kelga Resti yang di rawat di rumah sakit (%) | 70 | 90 | | |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN POKOK | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|---|---|--|-----------|-----------|---|-----------------------|
| | | | | 2011 5 | 2015 6 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Cek Kelga resti yang dikunjungi (%) | 80 | 90 | | |
| 16 | Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. | Menumbuhkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan | | | | 1,000.00 | Dinas Kesehatan |
| | - Pengembangan media promosi kesehatan dan teknologi komunikasi informasi dan edukasi (KIE) | mengembangkan upaya kese- hatan bersumber masyarakat | Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (%) | 60 | 70 | | |
| | | | Persentase posyandu pumama (%) | 40 | 47 | | |
| | - Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan. | Meningkatnya sarana kesehatan yg dimanfaatkan. | Jumlah sarana kesehatan yg beroperasi (persen) | 80% | 100% | | |
| | - Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan. | terciptanya pendidikan tenaga penyuluh kesehatan | Jumlah tenaga penyuluh kesehatan (org) | | | | |
| 17 | Pengawasan obat dan makanan | | | | | 500 | Dinas Kesehatan |
| | - Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya; | | persentase upaya penyuluh an P3 NAPZA oleh petugas kesehatan (%) | 70 | 80 | | |
| | - Peningkatan pengawasan penyalah gunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif (NAPZA) | | Cakupan pemeriksaan sarana produksi dan dis- tribusi produk terapeutik/ obat, obat tradisional, kos- metik, perbekalan kese- hatan rumah tangga, pro- duk komplemen dan produk pangan (%) | 60 | 80 | | |
| | - Peningkatan pengawasan mutu, khasiat dan keamanan produk terapeutik/obat, perbekalan kesehatan rumah tangga, obat tradisional, suplemen makanan dan produk kosmetika | | | | | | |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN POKOK | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|---|---|---|--------|------|---|-----------------------|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | - Penguatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan | | | | | | |
| 18 | Perbaiki Gizi Masyarakat. | Meningkatnya kesadaran gizi keluarga | | | | 1,000 | Dinas Kesehatan |
| | - Peningkatan pendidikan gizi | | Prosentase balita yang naik berat badannya (%) | 80 | 80 | | |
| | - Penanggulangan kurang energi protein (KEP) anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan Kurang zat gizi mikro lainnya | | Prosentase balita dibawah garis merah (%) | 18 | 10 | | |
| | - Penanggulangan gizi lebih | | Cakupan balita mendapat kapsul vitamin A 2 kali pertahun (%) | 90 | 100 | | |
| | - Peningkatan surveilens gizi | | Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe (%) | 90 | 100 | | |
| | - Pemberian tambahan makanan dan vitamin. | | Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada bayi gizi kurang dari keluarga miskin (%) | 100 | 100 | | |
| | - Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi. | | Prosentase balita gizi buruk mendapat perawatan sesuai dengan standar tata laksanaan gizi buruk (%) | 100 | 100 | | |
| | - Peningkatan gizi Institusi | | persentase bayi yang mendapat asi eksklusif (%) | 60 | 100 | | |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN POKOK | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|---|---|---|--------|------|---|-----------------------|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Persentase desa dengan garam beryodium (%) | 90 | 100 | | |
| | | | Kecamatan bebas rawan gizi (%) | 90 | 100 | | |
| 19 | Pengembangan Lingkungan Sehat. | Mewujudkan mutu lingkungan hidup yang sehat | | | | 4,000 | Dinas Kesehatan |
| | - Penyediaan sarana air bersih dan sanitari dasar di pedesaan | | Prosentase penduduk yg memiliki akses thd air minum berkualitas (%) | 62.5 | 67 | | |
| | - Pemeliharaan dan pengawasan kualitas lingkungan | | Prosentase kualitas air minum yang memenuhi syarat (%) | 90 | 100 | | |
| | - Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan | | Prosentase penduduk yg menggunakan jamban sehat (%) | 67 | 75 | | |
| | - Pengembangan wilayah sehat | | Prosentase kecamatan yg telah melaksanakan desa sehat (%) | 70 | 100 | | |
| | | | prosentase penduduk stop buang air besar sembarangan (BABS) (%) | 78 | 100 | | |
| | | | Prosentase cakupan daerah potensial yg melaksanakan strategi adaptasi dampak kesehatan akibat perubahan iklim (%) | 40 | 100 | | |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN POKOK | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|-----------|---|--|---|--------|------|---|-----------------------|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Prosentase cakupan tempat- umum yang memenuhi syarat kesehatan (%) | 79 | 85 | | |
| | | | Prosentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan (%) | 75 | 85 | | |
| | | | Prosentase kecamatan yang mem- yang memfasilitasi penyelenggara- an STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%) | 39 | 100 | | |
| | | | Prosentase cakupan tempat pengo- lahan makanan yang memebuhi syarat kesehatan (%) | 60 | 75 | | |
| | | | Prosentase kecamatan yg mem- fasilitasi penyelenggaraan desa se- hat yang sesuai standar (%) | 21 | 100 | | |
| | | | Jumlah yang melaksana- kan STBM | 40 | 100 | | |
| 20 | Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | Menurunnya angka kesakitan dan kecacatan akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular | Prosentase darah dohor diskrining terhadap HIV/AIDS (%) | 100 | 100 | 2,500 | Dinas Kesehatan |
| | - Pencegahan dan penanggulangan faktor resiko | | Jumlah klien yang menda- patkan pelayanan HIV/ AIDS sesuai standar | 100 | 100 | | |
| | - Peningkatan imunisasi | | (% Klien) | | | | |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN POKOK | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|---|---------|---|--------|------|---|-----------------------|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | - Penemuan dan tatalaksana penderita | | Jumlah Klien yang mendapat testing HIV/AIDS (% Klien) | 100 | 100 | | |
| | - Peningkatan surveilens epidemiologi dan pengendalian wabah | | Cakupan Desa/Kelurahan UCI (%) | 80 | 100 | | |
| | - Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit | | AFP rate per 100.000 penduduk 15 < tahun (anak) | 2 | 2 | | |
| | | | Prosentase kesembuhan penderita TBC BTA + (%) | 85 | 85 | | |
| | | | Prosentase penemuan dan pengobatan pneumonia balita sesuai standar (%) | 100 | 100 | | |
| | | | Prosentase penderita diare balita yang ditemukan dan ditangani sesuai standar (%) | 80 | 80 | | |
| | | | Prosentase penderita kusta yang selesai berobat (RTF rate %) | 100 | 100 | | |
| | | | Prosentase malaria yang diobati (%) | 60 | 100 | | |
| | | | Prosentase penderita DBD yang ditemukan dan ditangani sesuai standar (%) | 70 | 80 | | |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN POKOK | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|-----------|--|--|---|--------|------|---|-----------------------|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Cakupan pengobatan massal dan tatalaksana kasus filariasis sesuai standar (%) | 50 | 50 | | |
| | | | Infeksi menular seksual (IMS) yang ditemukan dan diobati sesuai standar (%) | 100 | 100 | | |
| | | | Terbentuknya klinis IMS Standar (Klinik) | 1 | 5 | | |
| | | | Prosentase desa/kelurah- an mengalami KLB yang ditangani < 24 Jam (%) | 100 | 100 | | |
| | | | Tingkat kelancaran sosi- alisasi, advokasi dan pe- nyebarluasan informasi pencegahan dan pembe- rantasan penyakit (%) | 70 | 100 | | |
| | | | Prosentase penderita ma- laria klinis dan dikonfirma- si sediaan darahnya (%) | 60 | 90 | | |
| 21 | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan. | | | | | | |
| | -Penyusunan standar pelayanan kesehatan | tersusunnya standar pelayanan kesehatan | tersedianya dokumen standar pelayanan kesehatan. | | | | Dinas Kesehatan |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN POKOK | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|---|---|--|--------|------|---|-----------------------|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | -Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan. | Meningkatnya standar pelayanan. | tersedianya sistem standar pelayanan yang efektif. | | | | |
| | -Pembangunan dan pemuktahiran data dasar standar pelayanan kesehatan. | Tersusunnya data dasar standar pelayanan kesehatan. | tersedianya dokumen data dasar standar pelayanan yang terkini. | | | | |
| 22 | Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin. | | | | | | Dinas Kesehatan |
| | -Pelayanan kesehatan penduduk miskin | Meningkatnya kesehatan penduduk miskin. | menurunnya angka gizi buruk /busung lapar. | | | | |
| | Pengadaan,peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya. | | | | | | Dinas Kesehatan |
| | - Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas; | Terbangunnya sarana dan prasarana puskesmas | Jumlah sarana dan prasarana puskesmas yang dibangun. | | | | |
| | - Rehabilitasi sedang/berat puskesmas; | Terpeliharannya bangunan puskesmas | Jumlah puskesmas yang direhabilitasi. | | | | |
| 23 | Pengadaan,peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata; | | | | | | Dinas Kesehatan |
| | - Pembangunan rumah sakit | Terbangunnya rumah sakit Umum Daerah | persentase penyelesaian pembangunan RS Umum Daerah | 50% | 100% | | |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN POKOK | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|--|---|---|--------|------|---|-----------------------|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | - Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit; | Tersedianya alat-alat kesehatan rumah sakit. | Jumlah dan jenis alat-alat kesehatan rumah sakit. | | | | |
| | - Pengadaan obat-obatan rumah sakit; | Tersedianya obat-obatan rumah sakit | Jumlah dan jenis obat-obatan rumah sakit | | | | |
| 24 | Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata; | | | | | | Dinas Kesehatan |
| | - Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit; | Terpeliharanya rumah sakit | tingkat kelayakan sarana rumah sakit | | | | |
| | - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit; | Terpeliharanya perlengkapan rumah sakit | tingkat kelayakan prasarana rumah sakit | | | | |
| 25 | Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan. | | | | | | Dinas Kesehatan |
| | - Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat | Terjalannya kerjasama antara pemda dan perusahaan. | Persentase penduduk yang menerima asuransi | | | | |
| | - Kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular. | Terjalannya kerjasama dgn masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyakit menular. | persentase menurunnya penyakit menular. | | | | |
| | - Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan | Terjalannya kerjasama antar rumah sakit. | persentase pasien rujukan yg tangani oleh pihak kemitraan | | | | |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN POKOK | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|-----------|---|---|---|--------|------|---|-----------------------|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | - Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu. | tertanganinya pasien yang kurang mampu | Jumlah pasien kurang mampu yang ditangani. | | | | |
| 26 | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita. | | | | | | Dinas Kesehatan |
| | - Penyuluhan kesehatan anak balita; | Terlaksananya penyuluhan kesehatan anak balita | penyuluhan dan pendampingan masyarakat untuk kesehatan anak balita(org) | | | | |
| | - Imunisasi bagi anak balita; | Terlaksananya imunisasi bagi anak | Jumlah anak balita yang terimunisasi. | | | | |
| | - Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita. | Meningkatnya SDM untuk perawatan anak balita | Jumlah SDM yang profesional dalam perawatan anak balita | | | | |
| 27 | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia; | | | | | | Dinas Kesehatan |
| | - Pelayanan pemeliharaan kesehatan; | Meningkatnya pelayanan pemeliharaan kesehatan | persentase lansia yang terawat kesehatannya. | | | | |
| | - Pendidikan dan pelatihan pelayanan kesehatan; | Meningkatnya SDM untuk pelayanan kesehatan lansia | Jumlah SDM yang profesional dalam perawatan kesehatan lansia. | | | | |
| | - Pelayanan kesehatan; | Terlaksananya pelayanan kesehatan untuk lansia | meningkatnya harapan hidup lansia | 70 | 71 | | |
| | Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan. | | | | | | Dinas Kesehatan |
| | -Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan . | Meningkatnya pengawasan terhadap makanan yang sehat | Tidak beredarnya makanan yang berbahaya bagi kesehatan di pasaran | | | | |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN POKOK | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|--|--|--|--------|------|---|-----------------------|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak. | Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar yang efektif dan efisien | | | | 5,000 | Dinas Kesehatan |
| | Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu | | Cakupan kunjungan ibu hamil K4 (%) | 88 | 95 | | |
| | | | Cakupan pertolongan per- salinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi ke- bidanan (%) | 86 | 90 | | |
| | Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu; kurang mampu; | | Ibu hamil resiko tinggi yang dirujuk (%) | 85 | 90 | | |
| | -Pertolongan persalinan bagi ibu dari kurang mampu. | | Cakupan kunjungan pela- nyan kesehatan kepada bayi baru lahir di satu wila- yah kerja pada kurun waktu tertentu oleh tenaga kese- hatan/bidan sesuai stan- dar (%) | 85 | 90 | | |
| | | | Cakupan kunjungan bayi baru lahir dengan berat badan lahir rendah yang dirujuk (%) | 87 | 90 | | |
| | | | Prosentase rujukan ibu hamil resiko tinggi yang tertangani (%) | 80 | 90 | | |
| | | | Cakupan peserta KB aktif (%) | 62 | 70 | | |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN POKOK | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|---|--|--|--------|------|---|----------------------------|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup (%) | 30 | 24 | | |
| | | | Angka kematian ibu me- lahirkan per 100.000 kelahiran hidup (/mil) | 273 | 102 | | |
| | | | Prosentase rujukan bayi badan rendah yang terta- ngani (%) | 80 | 90 | | |
| | | | Angka Harapan Hidup | 68 | 72 | | |
| 29 | Upaya kesehatan perorangan | Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan | | | | 6,700 | Dinas Kesehatan RSUD |
| | - pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di kelas III rumah sakit | | Tingkat pemanfaatan RS - BOR (%) | 70 | 80 | | |
| | | | - LOS (hari) | 6 | 9 | | |
| | | | - TOI (hari) | 3 | 5 | | |
| | - Pembangunan sarana dan prasara- na rumah sakit di daerah tertinggal secara selektif | | - BTO Kali | 50 | 50 | | |
| | | | Net Death Rate (%) | 2,5 | 2,5 | | |
| | | | Prosentase rujukan rumah sakit regionalnya (%) | 10 | 10 | | |
| | - Perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit | | | | | | |
| | | | Sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat sesuai standar yang dapat diak- ses masyarakat (%) | 70 | 80 | | |
| | - Pengadaan obat dan perbekalan rumah sakit | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | - Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan | | | | | | |
| | | | | | | | |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN POKOK | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|--|--|--|--------|------|---|-----------------------|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | - Pengembangan pelayanan dokter keluarga | | Persentase rumah sakit yang telah terakreditasi | 50 | 100 | | |
| | - Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan | | | | | | |
| | - Peningkatan peran serta sektor swasta dalam upaya kesehatan perorangan | | | | | | |
| 30 | Matra dan Penanggulangan Bencana | Meningkatnya pelayanan kesehatan terhadap lingkungan matra dan keadaan bencana | | | | 500 | Dinas Kesehatan RSUD |
| | - Pelayanan kesehatan matra penanggulangan bencana | | Prosentase kesehatan matra yang tertangani (%) | 80 | 100 | | |
| | | | Prosentase kejadian bencana yang tertangani (%) | 100 | 100 | | |
| 31 | Kesehatan Institusi | Meningkatnya penyelenggaraan kesehatan institusi | | | | 1,250 | Dinas Kesehatan |
| | - Pembinaan kegiatan kesehatan institusi | | Cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak balita dan pra sekolah oleh tenaga kesehatan 2 kali per tahun (%) | 90 | 100 | | |
| | - Pembinaan kegiatan usaha kesehatan sekolah | | Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat di satu wilayah kerja sesuai standar oleh | 100 | 100 | | |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN POKOK | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|--|---|---|--------|------|---|-----------------------|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | tenaga kesehatan atau tenaga terlatih paling sedikit 2 kali pertahun (%) | | | | |
| | | | Cakupan pelayanan kesehatan remaja (%) | 80 | 90 | | |
| 32 | Sumber Daya Kesehatan | Meningkatkan jumlah, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan, | | | | 2,500 | Dinas Kesehatan |
| | - Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan | analisis pembiayaan kesehatan, cakupan kepesertaan jaminan pemeliharaan kesehatan terutama bagi keluarga miskin dan pengembangan sistem informasi kesehatan | Prosentase puskesmas yang memiliki tenaga dokter (%) | 98 | 98 | | |
| | - Peningkatan keterampilan dan profesionalisme tenaga kesehatan melalui diklat tenaga kesehatan | | Prosentase rumah sakit kabupaten yang memiliki tenaga dokter spesialis dasar(%) | 72.3 | 90 | | |
| | - Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan terutama untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya , serta rumah sakit | | Meningkatnya pemerataan tenaga kesehatan : | | | | |
| | - Pembinaan tenaga kesehatan termasuk pengembangan karir tenaga kesehatan | | Rasio Dokter per 100.000 penduduk | 40 | 40 | | |
| | - Penyusunan standar kompetensi dan regulasi profesi kesehatan | | Rasio Dokter spesialis per 100.000 penduduk | 6 | 6 | | |
| | - Penyelenggaraan pendidikan kesehatan | | Rasio dokter keluarga per 100.000 penduduk | 2 | 2 | | |
| | - Kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan | | Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk | 11 | 11 | | |
| | | | Rasio Apoteker per | 10 | 10 | | |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN POKOK | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|--|--|---|--------|------|---|---|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 100.000 penduduk | | | | |
| | | | Rasio Bidan per 100.000 penduduk | 100 | 100 | | |
| | | | Rasio Perawat per 100.000 penduduk | 117 | 117 | | |
| | | | Rasio Ahli gizi 100.000 penduduk | 22 | 22 | | |
| | | | Rasio Ahli Sanitasi 100.000 penduduk | 40 | 40 | | |
| | | | Rasio Ahli Kesehatan Masy 100.000 penduduk | 40 | 40 | | |
| | | | Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan (%) | 100 | 100 | | |
| | | | Prosentase tenaga kesehatan yang telah dilegalisasi (%) | 100 | 100 | | |
| 33 | Program Keluarga Berencana - Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin; - Pelayanan KIE; - Pembinaan Keluarga Berencana | terlaksananya pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin | Jlh penduduk miskin yang ber KB dan menggunakan alat kontrasepsi. | % | % | 5000 | Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN POKOK | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|--|---|---|----------|------------|---|-----------------------------------|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 34 | Kesehatan Reproduksi Remaja | | | | | | |
| | - Advokasi dan KIE tentang kesehatan Reproduksi Remaja | Dilaksanakannya Sosialisasi ttg kesehatan reproduksi remaja yg diikuti oleh perwakilan organisasi pemuda /karang taruna di Setiap Kecamatan | Berkurangnya kasus kenakalan remaja | jmih kas | jmih kasus | 250 | Badan Pemberdayaan Masyarakat, |
| 35 | Pelayanan kontrasepsi | | | | | | |
| | - Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB; | terpasangnya kontrasepsi KB; | Meningkatnya jumlah KB Aktif | % | % | | Badan Pemberdayaan Masyarakat, |
| | - Pengadaan alat kontrasepsi | tersedianya alat kontrasepsi | | | | | Perempuan dan |
| 36 | Peningkatan penanggulangan narkoba,PMS termasuk HIV/AIDS | Dilaksanakannya penyuluhan Bahaya Narkoba, HIV/AIDS | Berkurangnya jml korban HIV/AIDS, Narkoba dan PMS | % | % | 250 | KB Badan Pemberdayaan Masyarakat, |
| | - Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah | disekolah-sekolah tiap kecamatan | | | | | Perempuan dan KB |

**RENCANA TINDAK PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN
RPJMD KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2011 - 2015**

Misi 3 : Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan iman dan taqwa serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi

BIDANG : Ekonomi

SEKTOR : Ketenagakerjaan

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Ruplah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|--|--|---|-----------|-----------|---|-------------------------------|
| | | | | 2011 5 | 2015 6 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja. | | | | | | Dinas Sosial, |
| | - Penyusunan data base tenaga kerja daerah. | - Tersedianya data base tenaga kerja daerah yang up to date | Adanya data base tenaga kerja daerah yang up to date | Ada | Ada | 100 | Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | - Pembangunan balai latihan kerja. | - Tersedianya balai latihan kerja yang representatif | Jumlah Balai Latihan Kerja representatif yang dibangun | 0 | 1 Buah | 500 | |
| | - Peningkatan Profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK. | - Peningkatan Profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK. | Tersedianya instruktur / tenaga kepelatihan yang profesional di Kab.Bky | 2 Org | 10 Org | 150 | |
| | - Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja | - Terlaksananya diklat bagi pencari kerja yang diikuti oleh kelompok masyarakat perwakilan tiap desa di Setiap kecamatan | Meningkatnya keterampilan peserta diklat | 21 Org | 124 Org | 350 | |
| 2 | Peningkatan Kesempatan Kerja | | | | | | Dinas Sosial, |
| | - Penyusunan dan penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja | - Tersedianya informasi bursa tenaga kerja yg uptodate | Mempermudah pencari kerja mendapat informasi bursa kerja | 12 bulan | 60 bulan | 125 | Tenaga Kerja dan Transmigrasi |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|---|---|---|----------|-----------|---|---|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | - Pengembangan kewirausahaan | - Peningkatan pengetahuan/ keterampilan pencari kerja | Jumlah masyarakat/ pengangguran yang diber- dayakan | 30 Orang | 150 Orang | 750 | |
| 3 | Pelindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan | | | | | | |
| | - Penyusunan dan penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja | - Tersedianya informasi bursa tanaga kerja yg uptodate | Mempemudah pencari kerja mendapat informasi bursa kerja | 12 bulan | 60 bulan | 125 | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN POKOK | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Ruplah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|---|---|---|--------|------|--|-------------------------------|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | - Pembinaan Trantibum ke Kecamatan | - Terbinanya trantibum ke kecamatan | | 40% | 100% | 309 | Ktr SatPol PP |
| 3 | Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat) | - Terselenggaranya penyuluhan pencegahan penyakit masyarakat yang diselenggarakan dilokasi yang berpotensi terjadi Pekat dan diikuti oleh kelompok masyarakat dan kelompok pemuda | Mencegah terjadinya dan atau menurunnya kasus, al : - peredaran/penggunaan Miras dan narkoba - Praktek prostitusi - Peredaran uang palsu - Premanisme - Tindak penyeludupan - Praktek perjudian - Eksploitasi anak di bawah umur | | | 500 | Kantor Kesbang Pol dan Linmas |
| | - Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba; | | | | | | |
| | - Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi; | | | | | | |
| | - Penyuluhan pencegahan peredaran uang palsu; | | | | | | |
| | - Penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme; | | | | | | |
| | - Penyuluhan pencegahan dan penertiban tindak penyeludupan; | | | | | | |
| | - Penyuluhan pencegahan praktek perjudian; | | | | | | |
| | - Penyuluhan pencegahan eksploitasi anak dibawah umur | | | | | | |
| 4 | Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber-sumber daya kelautan; | | | | | | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| | - Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan. | - Terbentuknya kelompok masyarakat swakarya pengamanan sumber kelautan | Jumlah kelompok masyarakat swakarya pengamanan sumber daya kelautan | Kip | Kip | 150 | |

**RENCANA TINDAK PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN
RPJMD KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2011 - 2015**

Misi 4 : Meningkatkan keamanan dan keharmonisan kehidupan masyarakat

**BIDANG : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
SEKTOR**

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|--|---|--|--------|------|--|--|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri | | | | | | |
| 1 | Pengembangan Wawasan Kebangsaan. | | | | | | |
| | - Pemantapan wawasan kebangsaan dan bela negara | - Terlaksananya penyuluhan wawasan kebangsaan dan bela negara | Diikutinya penyuluhan oleh seluruh LSM dan Ormas | 70 | 100 | 500 | Kantor Kesbang Pol dan Linmas |
| | - Pembinaan Ormas/LSM/OKP | - Terbinanya ormas/LSM/OKP | Persentase Peningkatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP | 70 | 100 | 250 | |
| | Kebudayaan | | | | | | |
| 2 | Pengembangan Nilai Budaya | | | | | | |
| | - Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah. | - Terlestarikannya adat budaya daerah. | Meningkatnya persentase adat budaya yg dilestarikan | % | % | 1,000 | Din. Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan |
| | - Pemberian dukungan penghargaan dan kerjasama di bidang budaya. | - Terjalinnnya kerjasama di bidang budaya antar daerah | Jumlah kerjasama budaya dg daerah lain meningkat (%) | % | % | 396 | |
| 3 | Pengelolaan Kekayaan Budaya | | | | | | |
| | - Fasilitasi partisipasi dalam pengelolaan kekayaan budaya. | - Terfasilitasinya pengelolaan kekayaan budaya | Meningkatnya persentase adat budaya yg dilestarikan | % | % | 450 | Din. Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|--|--|---|-----------|------------|--|--------------------------------|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | - Pengembangan kebudayaan dan pariwisata. | - Berkembangnya budaya dan pariwisata daerah | Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yg dilestarikan | % | % | 450 | Olahraga |
| 4 | Pengelolaan Keragaman Budaya | | | | | | |
| | - Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah. | - Berkembangnya kesenian dan kebudayaan daerah | Meningkatnya jumlah sanggar seni daerah | Bh | Bh | 500 | Din. Kebudayaan Pariwisata, |
| | - Penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan | - Tersedianya wadah utk kemudahan akses informasi bidang kebudayaan daerah | Adanya Database dan Web Site Bidang Kebudayaan Kabupaten Bengkayang | | Ada | | Pemuda dan Olahraga |
| | - Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah. | - Terselenggaranya festival budaya daerah | Meningkatnya jumlah wisatawan yg masuk | 6.500 org | 40.000 Org | | |

**RENCANA TINDAK PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN RPJMD
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2011 - 2015**

Misi 5 : Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang prima demi mewujudkan pemerintahan yang baik

BIDANG : Hukum dan Aparatur
SEKTOR

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|---|---|---|--------|--------|---|-----------------------|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Pemerintahan umum | | | | | | |
| 1 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. | | | | | 10,000 | DPRD |
| | -Pembahasan rancangan peraturan daerah. | - terciptanya rancangan peraturan daerah | ketepatan waktu untuk menyusun Perda. (%) | 80% | 100% | | |
| | -Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD | - Meningkatnya Pengetahuan Pimpinan dan anggota DPRD | Persentase Anggota DPRD yg telah mengikuti pelatihan Peraturan perundang-undangan terbaru | 70% | 90% | | |
| | -Sosialisasi peraturan perundang-undangan. | - Dilaksanakannya sosialisasi perundang-undangan ke sirh kecamatan dan diikuti oleh Pejabat dan Tokoh Masyarakat di Kecamatan | Dilaksanakannya sosialisasi perundang-undangan ke sirh kecamatan dan diikuti oleh Pejabat dan Tokoh Masyarakat di Kecamatan | 17 Kec | 17 Kec | | |
| 2 | Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wilayah Kepala Daerah. | | | | | | Sekretariat Daerah |
| | - Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan. | - Peningkatan pelayanan kedinasan KDH/WaKDH | Persentase kunjungan KDH/WaKDH ke masyarakat yang bisa menampung aspirasi masyarakat. | 100% | 100% | 1,540 | |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|---|--|--|--------|------|---|---|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| | - Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luarnegeri | - Peningkatan pelayanan kedinasan KDH/WaKDH | Persentase ketidakhadiran KDH/WaKDH bisa menghadiri kunjungan Pejabat negara/ lembaga pemerintah non departemen. | 5% | 5% | 1,419 | |
| | - Rapat koordinasi unsur MUSPIDA | - Peningkatan pelayanan kedinasan KDH/WaKDH | Persentase masalah-masalah daerah yang terselesaikan. | 80% | 95% | 1,394 | |
| | - Rapat koordinasi pejabat pemerintah | - Peningkatan pelayanan kedinasan KDH/WaKDH | Persentase jumlah pejabat pemerintah yang hadir dalam rapat koordinasi | 100% | 100% | 950 | |
| | - Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah | - Peningkatan pelayanan kedinasan KDH/WaKDH | Persentase masyarakat yang hadir dalam kunjungan kerja. | 80% | 90% | 2,248 | |
| | - Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. | - Peningkatan pelayanan kedinasan KDH/WaKDH | Terciptanya hubungan kerja yg harmonis dengan pemerintah/ instansi vertikal. | | | 1,436 | |
| 3 | Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. | | | | | | Dinas |
| | - Peningkatan manajemen investasi daerah. | - Meningkatnya investasi daerah | Persentase investasi daerah. | | | 1,000 | Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah |
| | - Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah | - Meningkatnya sumber-sumber pendapatan. | Persentase peningkatan pendapatan daerah | | | 1,500 | |
| | - Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Aset | - Terlaksananya penyelesaian masalah aset daerah | Persentase penyelesaian aset | | | 1,282 | Sekretariat Daerah |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA | | | | | | |
|----|--|------------------------------------|--|--|------|---|---|---|---|--|---|------------------|--------|
| | | | | 2011 | 2015 | | | | | | | | |
| 4 | Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota. | | | | | | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah | | | | | | |
| | | | | | | | | - Evaluasi rancangan peraturan tentang APBD Kabupaten/Kota. | - Penyusunan Peraturan Apbd yang tepat waktu. | Tersedianya Perda APBD, Perda Perubahan APBD dan Perda Pertanggungjawaban APBD dan tepat waktu | Ada Tepat wkt | Ada Tepat wkt | 2,500 |
| | | | | | | | | - Asistensi penyusunan rancangan regulasi pengelolaan daerah kabupaten kab./kota. | - Penyusunan Peraturan APBD yang sesuai dgn ketentuan yang berlaku. | Tersedianya Perda APBD, Perda Perubahan APBD dan Perda Pertanggungjawaban APBD dan tepat waktu | Ada Tepat wkt | Ada Tepat wkt | 1,500 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH. | | | | | | Inspektorat | | | | | | |
| | | | | | | | | - Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala. | - Menurunnya angka temuan setiap tahun | - Jumlah pemeriksaan menurut PKPT. | 70% jumlah orbit | 100% Jlh orbit. | 1,250 |
| | | | | | | | | | | -Persentase PKPT yang terlaksana | 100% | 100% | |
| | | | | | | | | | | -Jumlah laporan yang terbit | 100% | 100% | |
| | | | | | | | | | | -Ketepatan waktu penyelesaian LHP | 100% | 100% | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | - Ketertiban SKPD dalam melaksanakan kebijakan KDH | meningkatnya jumlah SKPD yang tertib administrasi | 51 SKPD | 51SKPD |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | - Inventarisasi temuan pengawasan. | - Tersusunnya temuan berdasarkan pengawasan. | Jumlah temuan pemeriksaan yang diinventarisir: | | | 1,350 | | | | | | |
| | | | | -Temuan Inspektorat | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | | | -Temuan BPKP | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | | | -Temuan BPK | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | | | Temuan SPIP lainnya | 100% | 100% | | | | | | | |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Ruplah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|---|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| | | - LHP baik dari pemeriksaan internal maupun eksternal | Berkurangnya jumlah temuan pengawasan dari pemeriksa | 25 temuan | 15 temuan | 1,000 | DPPKAD |
| | - Tindak lanjut hasil temuan pengawasan. | - Menurunnya angka temuan setiap tahun | Jumlah temuan pemeriksaan yang dapat ditindaklanjuti: -Temuan Inspektorat -Temuan BPKP -Temuan BPK Temuan SPIP lainnya | 100% 100% 100% 100% | 100% 100% 100% 100% | 1,125 | Inspektorat |
| | | - Menindaklanjuti LHP baik dari pemeriksaan internal maupun eksternal | Meningkatnya jumlah temuan pengawasan yang sudah ditindaklanjuti. | 15 temuan | 25 temuan | 1,000 | DPPKAD |
| | - Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan. | - Menurunnya angka temuan setiap tahun | Jumlah temuan yang dievaluasi -Temuan Inspektorat -Temuan BPKP -Temuan BPK Temuan SPIP lainnya | 100% 100% 100% 100% | 100% 100% 100% 100% | 1,175 | Inspektorat |
| | - Pemeriksaan terhadap SKPD | - Menurunnya angka temuan setiap tahun | -Tingkat ketepatan pelaksanaan proyek sesuai juknis - Tingkat ketepatan penertiban LHP sesuai PKPT. -Tingkat ketepatan pemeriksaan sertijab. -Jumlah SKPD penghasil PAD yang diperiksa. -Ketepatan penyampaian Lap.P | 100% 100% 100% 100% 100% | 100% 100% 100% 100% 100% | 2,625 | Inspektorat |
| 6 | Penigkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan aparatur pengawasan | - Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur pengawasan. | -Meningkatnya pengetahuan tenaga pemeriksaan -Ketepatan waktu pembuatan | 60% | 85% | 3,000 | Inspektorat |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|---|---|--|---------|----------|---|-----------------------|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| | | | laporan. | | | | |
| | - Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja. | | -Meningkatnya pengetahuan tenaga pemeriksa. -Jumlah JFA | 60% | 60% | 2,250 | |
| | | | | 9 orang | 21 orang | | |
| 7 | Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan. | | | | | | Inspektorat |
| | - Penyusunan Kebijakan sistem dan prosedur pengawasan. | - Meningkatnya kualitas hasil pemeriksaan. | -Persentase hasil audit yang telah mengikuti Sisdur. -Persentase auditor yang telah menyerahkan KKP | 75% | 100% | 250 | |
| | | | | 100% | 100% | | |
| 8 | Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi. | | | | | | Inspektorat |
| | - Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik. | - Penyediaan informasi hasil pengawasan yang cepat dan tepat. | Tersedianya data pengawasan akurat dan tepat waktu. Tingkat ketepatan informasi hasil TLHP. | 75% | 75% | 250 | |
| | | | | 75% | 75% | | |
| 9 | Kerjasama Peningkatan Kerjasama Antara Daerah. | | | | | 500 | Sekretariat Daerah |
| | - Fasilitasi/Pembentukan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi | - Terjalannya kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi | Terjalannya kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi | 1 | 1 | | |
| | - Fasilitasi/Pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana publik. | - Terjalannya kerjasama antar daerah pada bidang saran dan prasarana publik | Terjalannya kerjasama antar daerah pada bidang saran dan prasarana publik | 1 | 1 | | |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Ruplah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|---|---|---|--------|------|---|--------------------------|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 10 | Penataan Peraturan Perundang-Undangan. | | | | | 3,000 | Sekretariat Daerah |
| | - Legistasi rancangan peraturan perundang-undangan. | - Peningkatan legistasi Draf dan Perda . | Ketepatan waktu penyusunan Draf dan Perda. | 100% | 100% | | |
| | - Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan | - Meningkatnya sosialisasi mengenai peraturan yang telah disusun. | Persentase penyebarluasan informasi mengenai Perda yang ada di masyarakat di seluruh kecamatan | 100% | 100% | | |
| | Penataan Daerah Otonomi Baru. | | | | 100% | 1,500 | Sekretariat Daerah |
| | - Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah. | Meningkatnya penyelesaian tapal batas wilayah . | Jumlah wilayah yang sudah jelas tapal batasnya. | | | | |
| | - Penyempurnaan SOPD Kab. Bengkayang. | Meningkatnya kinerja SOPD | Persentase penyempurnaan SOPD. | 100% | 100% | | |
| 11 | Kepegawaian Pendidikan kedinasan | Meningkatnya kreativitas dan profesionalisme aparatur | | | | 1,000 | |
| | - Pendidikan dan pelatihan teknis; | | Persentase peserta diklat yang yg dapat menerapkan hasil diklatnya untuk pekerjaannya | 100% | 100% | | Badan Kepegawaian Daerah |
| | - Peningkatan ketrampilan dan profesional | | Jumlah PND yg mengikuti diklat dan Persentase peserta diklat yg dapat menerapkan hasil diklatnya utk pekerjaannya | 100% | 100% | | |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|---|---|---|--------|------|---|-----------------------|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 12 | Peningkatan sumberdaya aparatur daerah; | | | | | 15,000 | Badan |
| | - Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah; | | | | | | Kepegawaian Daerah |
| | - Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah; | - Terlaksananya Diklatpim Tk.IV | Rasio pejabat struktural yang telah mengikuti Diklatpim Tingkat IV | 80% | 100% | | |
| | | - Terlaksananya Diklatpim Tk.III | Rasio pejabat struktural yang telah mengikuti Diklatpim Tingkat III | 80% | 100% | | |
| | | - Terlaksananya Diklatpim Tk.II | Rasio pejabat struktural yang telah mengikuti Diklatpim Tingkat II | 100% | 100% | | |
| | | | Terselenggaranya diklat LEMHANAS bagi PNS yang memenuhi syarat | 100% | 100% | | |
| | - Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah; | - Diikutinya pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah | Jumlah peserta pelatihan teknis tugas dan fungsi | Org | Org | | |
| | - Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS | - Diikutinya diklat fungsional bagi PNS fungsional yang diikuti oleh PNS Fungsional | Jumlah peserta diklat fungsional | Org | Org | | |
| 13 | Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | | | | | | Badan |
| | - Penyusunan rencana Pembinaan karir PNS | - Pembinaan karir PNS dapat terencana dengan baik | Ada buku rencana pembinaan karir PNS dengan baik | Ada | Ada | | Kepegawaian Daerah |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|--|---|---|----------------------------------|----------------------------------|---|-----------------------|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| | - Penempatan PNS | - Ditematkannya PNS pada posisi/tempat yang sesuai dg disiplin ilmu dan tingkat pendidikannya | | | | | |
| | - Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS | - Tertatanya sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS | Tersedianya Sistem Informasi Kenaikan pangkat otomatis PNS yang dapat berfungsi dengan baik | Ada | Ada | 500 | |
| | - Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah; | - Tersedianya SIMPEG Daerah yg dapat berfungsi dg baik dan terkini | Tersedianya SIMPEG Daerah yg dapat berfungsi dg baik dan terkini | Ada | Ada | 500 | |
| | - Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi; | - Diberikannya penghargaan utk PNS Berprestasi | Meningkatnya jumlah PNS berprestasi | Org | Org | | |
| | - Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS | - Tertanganinya kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS | Persentase penyelesaian kasus pelanggaran disiplin PNS | 70% | 100% | 500 | |
| 14 | Pengembangan data/informasi/statistik daerah. | | | | | | Bappeda |
| | - Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah. | - Tersusunnya buku KDA tepat waktu setiap tahunnya | Adanya buku KDA setiap tahun | Ada | Ada | 750 | |
| | - Penyusunan dan Pengumpulan data PDRB. | - Tersusunnya buku PDRB tepat waktu setiap tahunnya | Adanya buku PDRB setiap tahun | Ada | Ada | 750 | |
| 15 | Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa. | | | | | | Sekretariat Daerah |
| | - Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan. | - Dilaksanakannya pelatihan utk aparatur desa yg diikuti oleh seluruh kepala desa se Kab.Bky | Dilaksanakannya pelatihan utk aparatur desa yg diikuti oleh seluruh kepala desa se Kab.Bky | Terlaksana 124 Org Peserta | Terlaksana 124 Org Peserta | 1,200 | |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|--|--|--|--------|--------|---|--|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| | - Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa. | - Dilaksanakannya pelatihan utk aparatur desa yg diikuti oleh seluruh Kades/Sekdes se Kab.Bengkayang | Persentase laporan keuangan desa yang tepat waktu dan benar | | 95% | 1000 | |
| | Kearsipan. | | | | | | |
| 16 | Pebaikan Sistem Administrasi Kearsipan. | | | | | | |
| | - Pembangunan database Informasi kearsipan | - terciptanya sistem informasi yang terkini | Adanya Sistem Informasi kearsipan yang terkini | | Ada | 150 | Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumen |
| | - Kajian sistem administrasi kearsipan | - Dilakukannya kajian administrasi-kearsipan yang baik | Administrasi kearsipan yg di susun sudah sesuai dg aturan yang berlaku. | Sesuai | Sesuai | 100 | |
| | - Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan. | - terpeliharanya peralatan jaringan informasi kearsipan | Jaringan Informasi kearsipan yg ada, dapat digunakan dg baik dan data yg ditampilkan terkini | | ada | | |
| 17 | Penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah. | | | | | | |
| | - Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip | terbangunnya sarana pengolahan & penyimpanan arsip | Jumlah sarana pengelolaan dan penyimpanan arsip. | buah | buah | | Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumen Daerah |
| | - Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah. | tersusunnya data dan dokumen yang rapi. | Adanya data dan dokumen yang siap digunakan dan terkini | Ada | ada | | |
| | - Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informasi. | tersedianya dokumen dalam bentuk informasi | persentase berita yang diinformasikan. | | | | |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|--|--|---|---------|------------|---|---|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 18 | Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan. | | | | | | Kantor |
| | - pemeliharaan ruti/berkala arsip daerah. | terpeliharanya arsip-arsip daerah | Persentase arsip daerah yg mempunyai kondisi baik | % | % | | Perpustakaan Arsip dan Dokumen Daerah Dokumen |
| 19 | Fasilitasi Peningkatan SDM bidang informasi dan komunikasi. | | | | | | |
| | - Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi. | terlatihnya SDM untuk komunikasi dan informasi. | Adanya tenaga profesional bidang komunikasi&informasi di setiap SKPD | | 1 Org/SKPD | | seluruh SKPD |
| | Komunikasi dan Informasi | | | | | | |
| 20 | Kerjasama Informasi dengan mas media | | | | | | |
| | - Penyebarluasan informasi pembangunan daerah | tersebarluasnya informasi pembangunan daerah | Adanya Web Site SKPD yg memuat informasi pembangunan | Ada | Ada | | seluruh SKPD |
| | - Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah | tersebarluasnya informasi penyelenggaraan pemda | Jumlah informasi yang termuat dalam masmedia mengenai penyelenggaraan pemda dalam setahun | 12 Kali | 60 Kali | | |
| | - Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat. | tersebarluasnya informasi untuk penyuluhan masyarakat. | Adanya Web Site Pemda bersifat penyuluhan bagi masyarakat luas | Ada | Ada | | |
| | Perencanaan Pembangunan | | | | | | |
| 21 | Program Pengembangan data/informasi | | | | | | BAPPEDA |
| | - Pengumpulan,updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja | - Terkumpulnya data informasi capai target kinerja. | Adanya data dan analisis data informasi capaian target kinerja | | Ada | 600 | |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|---|---|--|--------|--------|---|---|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| | - Penyusunan Profile Daerah | - Tersusunnya profile daerah | Adanya buku profil daerah setiap tahunnya | Ada | Ada | 600 | |
| 22 | Program Kerjasama Pembangunan | | | | | | |
| | - Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan | - Terlaksananya koordinasi kerjasama perbatasan sebelum | persentase keikutsertaan/ kehadiran pemda dalam kegiatan/ acara dibidang kerjasama perbatasan | 80% | 100% | 1,050 | BAPPEDA |
| | - Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah | - Meningkatnya kerjasama antar daerah | Jumlah MOU kerjasama antar daerah | 1 | 1 | | |
| 23 | Program Pengembangan Wilayah Perbatasan | | | | | | Ktr Pengelola Kawasan perbatasan antar daerah |
| | - Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah | - Dilaksanakannya rapat koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah | Persentase garis batas wilayah antar daerah yang telah disepakati | | 100 | 500 | |
| | - Penyusunan perencanaan pengembangan perbatasan. | - Tersusunnya dokumen perencanaan pengembangan perbatasan | Adanya dokumen perencanaan pengembangan perbatasan sbg acuan dim pembangunan daerah perbatasan | | ada | 200 | |
| 24 | Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah. | | | | | | BAPPEDA |
| | - Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana | - Meningkatnya kemampuan Aparat perencana | Persentase PNS BAPPEDA yang mengikuti pelatihan/bimtek perencanaan pembgn daerah | 80 | 100 | 1,000 | |
| | - Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah | - Terlaksananya sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah diseluruh kec. | Dilaksanakannya sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan di keluruh kecamatan | 17 Kec | 17 kec | 150 | |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|---|---|---|--------|------|---|-----------------------|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| | | | yang dihadiri oleh seluruh kades dan tokoh masyarakat di setiap kecamatan | | | | |
| | - Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah | - Dilaksanakannya Bimtek Perencanaan Pembangunan Daerah di kab.Bky yg diikuti oleh seluruh SKPD sesuai tupoksinya | Persentase Dokumen Perencanaan SKPD (Restra dan Renja) yang disusun benar sesuai aturan dan tepat waktu | 60 | 100 | 600 | |
| 25 | Program Perencanaan pembangunan daerah | | | | | | BAPPEDA |
| | - Penyusunan Dokumentasi Perencanaan Pembangunan daerah | - Tersusunnya Dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai dg petunjuk yang ada dan tepat waktu | Adanya dokumen perencanaan pembangunan sesuai petunjuk yang ada | | | 1,800 | |
| | RPJMD | | RPJMD | Ada | Ada | | |
| | RKPD | | RKPD | Ada | Ada | | |
| | KUA dan PPAS | | KUA dan PPAS | Ada | Ada | | |
| | KUA dan PPAS Perubahan | | KUA dan PPAS Perubahan | Ada | Ada | | |
| | | | Persentase kesesuaian program antara Dok RKPD dgn RPJMD | 70 | 95 | | |
| | | | Persentase kesesuaian program antara Dok PPAS dgn RKPD | 70 | 95 | | |
| | - Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah | - Terlaksananya Monitoring ke Kecamatan dan dilaksanakannya evaluasi dan pengendalian kegiatan serta disusunnya laporan sesuai peraturan serta diserahkan tepat waktu | Meningkatnya persentase SKPD yang menyampaikan laporan benar dan tepat waktu | 70 | 100 | 1,250 | BAPPEDA |

**RENCANA TINDAK BIDANG PEMBANGUNAN RPJMD
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2011 - 2015**

Misi 5 : Meningkatkan kapasitas aparaturn pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang prima demi mewujudkan pemerintahan yang baik

BIDANG : Ekonomi
SEKTOR

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Ruplah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|---|---|--|-----------|-----------|---|-----------------------------|
| | | | | 2011 5 | 2015 6 | | |
| 1 | Ketenagakerja | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Pertindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. | | | | | | Dinas Sosial |
| | - Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan; | - terselesaikannya kasus tenaga kerja yg ada | Persentase Kasus tenaga kerja yang terselesaikan | 50 | 90 | 200 | Tenaga Kerja & Transmigrasi |
| | - Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan; | - Meningkatnya ketaatan perusahaan thd peraturan ketenagakerjaan | Persentase perusahaan yang mematuhi peraturan ketenagakerjaan | | 100 | 250 | |
| | Perencanaan Pembangunan | | | | | | |
| 2 | Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | | | | | | BAPPEDA |
| | - Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh | - Tersusunnya rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh | Adanya dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh | ada | ada | 200 | |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|--|--|---|--------|------|---|-----------------------|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 3 | Perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar. | | | | | | |
| | - Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. | - Adanya sinkronisasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi . | Persentase kesesuaian perencanaan pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi dg RTRWK | | 90 | 200 | |
| 4 | Perencanaan pembangunan ekonomi. | | | | | | |
| | - Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah | - Tersedianya masterplan ekonomi daerah | Adanya dokumen induk perencanaan ekonomi sbg bahan acuan perencanaan bidang ekonomi | ada | ada | 200 | |
| | - Penyusunan indikator ekonomi daerah | - Tersedianya data indikator ekonomi daerah | Adanya dokumen induk perencanaan pendidikan sbg bahan acuan perencanaan bidang pendidikan | ada | ada | 200 | |

**RENCANA TINDAK BIDANG PEMBANGUNAN RPJMD
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2011 - 2015**

Misi 5 : Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang prima demi mewujudkan pemerintahan yang baik

BIDANG : Politik

SEKTOR : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Ruplah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|---|---|--|--------|------|---|----------------------------------|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Pendidikan Politik Masyarakat . | | | | | | |
| | - Penyuluhan kepada masyarakat. | - Meningkatnya budaya politik yang demokratis dimasyarakat. | Persentase penduduk yang menggunakan hak pilihnya saat pemilu. | 70 | 90 | 150 | Kantor Kesbang Pol dan Linmas |
| | - Verifikasi administrasi bantuan keuangan partai politik | - Terlaksananya pelaporan keuangan parpol yang akuntabel | Persentase pelaporan keuangan partai politik yang akuntabel | 70 | 100 | 100 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**RENCANA TINDAK BIDANG PEMBANGUNAN RPJMD
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2011 - 2015**

Misi 5 : Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang prima demi mewujudkan pemerintahan yang baik

BIDANG : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

SEKTOR : Perencanaan Pembangunan

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|---|-------------------------------------|---|--------|------|--|--------------------|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Program perencanaan sosial dan budaya | | | | | | BAPPEDA |
| | - Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan | - Tersedianya masterplan pendidikan | Adanya dokumen induk perencanaan pendidikan sbg bahan acuan perencanaan bidang pendidikan | Ada | Ada | 250 | |
| | - Koordinasi penyusunan Masterplan kesehatan | - Tersedianya masterplan kesehatan | Adanya dokumen induk perencanaan kesehatan sbg bahan acuan perencanaan bidang kesehatan | Ada | Ada | 250 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**RENCANA TINDAK BIDANG PEMBANGUNAN RPJMD
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2011 - 2015**

Misi 5 : Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang prima demi mewujudkan pemerintahan yang baik

BIDANG : Sumber Daya Alam
SEKTOR :

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|---|--|---|--------|------|---|-----------------------|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam | | | | | | BAPPEDA |
| | - Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah | - Tersusunnya maspteripan perhubungan daerah. | Adanya dokumen induk perencanaan perhubungan sbg bahan acuan perencanaan bidang prasarana wilayah | Ada | Ada | 250 | |
| 2 | Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana. | | | | | | BPBD |
| | - Koordinasi penyusunan profile daerah rawan bencana | - Terusunnya profile daerah rawan bencana | Adanya Profil daerah rawan bencana sbg bahan acuan perencanaan pembangunan daerah | Ada | Ada | 200 | |
| | - Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana. | - Terdapat data pembangunan daerah rawan bencana | Jumlah koordinasi pemba - ngunan daerah rawan bencana yg dilakukan | kali | kali | 200 | |

**RENCANA TINDAK PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN
RPJMD KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2010 - 2015**

Misi 6 : Meningkatkan partisipasif aktif masyarakat

BIDANG : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

SEKTOR : Pemberdayaan Perempuan

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|--|--|--|--------|------|---|--------------------------|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Pemberdayaan Masyarakat dan desa | | | | | | |
| 1 | Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan. | | | | | | Badan Pemberdayaan |
| | - Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan | Persentase kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) | % | % | 250 | Masyarakat, Perempuan |
| 2 | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa. | | | | | | Badan Pemberdayaan |
| | - Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa. | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan | Persentase kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) | % | % | 250 | Perempuan dan KB |
| | - Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa. | Dilaksanakannya Musrenbangdes yg diikuti oleh seluruh aparat desa dan tokoh masyrk di desa | Adanya kesepakatan bersama hasil musrenbangdes | Ada | Ada | 100 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|--|---|---|--------|--------|---|---|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan. | | | | | | |
| | - Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif. | Dilaksanakannya pelatihan bid Usaha Ekonomi di Desa yg diikuti oleh perwakilan tokoh perempuan di Desa | Meningkatnya pendapatan perempuan di desa (%) | 10 | 30 | 500 | Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB |
| | Pemberdayaan Perempuan | | | | | | |
| 4 | Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan. | | | | | 500 | Badan Pemberdayaan |
| | - Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan dibidang politik dan jabatan politik. | terciptanya kebijakan peran dan posisi perempuan dibidang politik & jabatan. | Persentase partisipasi perempuan dibidang politik dan jabatan politik | % | % | | |
| | - Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. | - Tersosialisasinya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlingdung an anak. | Terfaksananya sosialisasi kesetaraan gender, pember- dayaan perempuan dan perlindungan anak yg diikuti oleh seluruh org perempuan dari seluruh kecamatan | 17 Kec | 17 Kec | 250 | |
| 5 | Program Penguatan Kelembagaan pengarusutamaan Gender dan anak. | | | | | | Badan Pemberdayaan |
| | - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak. | - Adanya lembaga untuk mengurus gender dan anak. | Adanya lembaga untuk mengurus gender dan anak. | | Ada | 200 | Masyarakat, Perempuan dan KB |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|--|---|--|--------|------|---|---|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | - Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak. | - meningkatnya kapasitas dan jaringan kelembagaan untuk perempuan dan anak. | Adanya lembaga pemberdayaan perempuan dan anak | | Ada | 200 | |
| 6 | Peningkatan Kualitas hidup dan Perlindungan Perempuan. | | | | | | Badan |
| | - Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah. | - terciptanya perlindungan perempuan di daerah. | Persentase tindak kekerasan dalam rumah tangga | % | % | 300 | Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB |
| | - Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan. | - terciptanya fasilitas untuk perlindungan perempuan. | Persentase tindak kekerasan dalam rumah tangga | % | % | 150 | |
| 7 | Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan | | | | | | Badan |
| | - Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan. | Terciptanya organisasi perempuan. | Persentase organisasi perempuan yang dibina | 50% | 100% | 125 | Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB |
| | - Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha. | terlaksananya bimbingan manajemen usaha bagi perempuan. | Persentase perempuan yang mengelola usaha | % | % | 200 | |
| | Sosial | | | | | | |
| 8 | Pemberdayaan fakir miskin, Kominutas Adat Terpencil(KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | | | | | | Dinas Sosial Tenaga Kerja & Transmigrasi |
| | - Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT | Tersedianya petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT | Jumlah petugas | 10 | 50 | 300 | |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|--|--|--|--------|------|---|-----------------------------|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | berdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya; | dan PMKS lainnya yang profesional | | | | | |
| | - Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin; | Dilaksanakannya pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin | Persentase peningkatan wira-swasta/ usaha rumah tangga | 40 | 70 | 350 | |
| | - Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial; | Dilaksanakannya pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial | Persentase peningkatan wira-swasta/ usaha rumah tangga bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial | 40 | 70 | 350 | |
| 9 | Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial; | | | | | | Dinas Sosial |
| | - Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi perdagangan perempuan dan anak | Terciptanya pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi perdagangan perempuan dan anak | Adanya standar operasional pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi perdagangan perempuan dan anak | | Ada | 250 | Tenaga Kerja & Transmigrasi |
| | - Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan; | Terkoordinasinya perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan; | Persentase keluarga miskin | 30 | 10 | 450 | |
| | - Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa; | Terciptanya unit penanganan masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa | Adanya unit penanganan masalah strategis dan jumlah masalah yang tertangani | | Ada | 250 | |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|--|--|---|-----------|-----------|---|-----------------------------|
| | | | | 2011 5 | 2015 6 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | Pembinaan para penyandang cacat taruma; | | | | | | Dinas Sosial |
| | - Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan; | Terlaksananya pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan | Tersedianya data penyandang cacat dan penyakit kejiwaan | | Ada | 200 | Tenaga Kerja & Transmigrasi |
| | - Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks taruma; | Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma | Persentase penyandang cacat dan eks trauma yang telah dilatih | 50 | 100 | 250 | |
| 11 | Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya); | | | | | | Dinas Sosial |
| | - Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial; | Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi eks penyandang penyakit sosial | Persentase penyandang penyakit sosial yang telah dilatih | 50 | 100 | 250 | Tenaga Kerja & Transmigrasi |
| | - Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial. | Meningkatnya peran serta eks penyandang sosial dalam perekonomian dan pembangunan | Persentase eks penyandang penyakit sosial yang berperan serta | 50 | 100 | 250 | |
| 12 | Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial | | | | | | Dinas Sosial |
| | - Peningkatan peranaktif masyarakat dan dunia usaha; | Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam kelembagaan kesejahteraan sosial | Persentase organisasi masyarakat dan dunia usaha yang berperan aktif dalam kelembagaan kesejahteraan sosial | % | % | 250 | Tenaga Kerja & Transmigrasi |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|--|--|--|--------|------|--|---|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | - Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial; | Terciptanya model kelembagaan perlindungan sosial yang efektif | Adanya model kelembagaan perlindungan sosial | | Ada | 300 | |
| | Pemuda dan olahraga | | | | | | |
| 13 | Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda. | | | | | | Dinas |
| | - Penyusunan pedoman komunikasi, informasi, edukasi, dan advokasi tentang kepemimpinan pemuda; | Tersusunnya pedoman komunikasi, informasi, edukasi, advokasi tentang kepemimpinan pemuda | Adanya pedoman Komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi tentang kepemimpinan pemuda | | Ada | 250 | Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |
| | - Penyusunan rancangan pola kemitraan antarpemuda dengan masyarakat; | Tersusunnya rancangan pola kemitraan antarpemuda dengan masyarakat | Adanya pola kemitraan antar pemuda dengan masyarakat | | Ada | 150 | |
| | - Perumusan kebijakan kewirausahaan bagi pemuda | Terciptanya kebijakan kewirausahaan bagi pemuda | Persentase partisipasi pemuda dalam berwirausaha | % | % | 300 | |
| 14 | Peningkatan peran serta kepemudaan | | | | | | Dinas |
| | - Pembinaan organisasi kepemudaan. | Meningkatnya peran serta organisasi kepemudaan dalam pembangunan | Persentase organisasi kepemudaan yang berperan aktif dalam pembangunan | % | % | 200 | Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |
| | - Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di kalangan generasi muda. | Terlaksananya penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda | Persentase pengguna narkoba di kalangan generasi muda | % | % | 350 | |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|---|--|---|--------|------|---|---|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | - Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan. | Meningkatnya peran serta pemuda dalam keamanan lingkungan | Persentase kelompok binaan pemuda pelopor keamanan lingkungan | % | % | 250 | |
| 15 | Peningkatan upaya penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda | | | | | | Dinas |
| | - Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda | Terlaksananya pelatihan kewirausahaan bagi pemuda | Persentase pemuda yang telah dilatih kewirausahaan | % | % | 300 | Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |
| | - Pelatihan ketrampilan bagi pemuda. | Terlaksananya pelatihan ketrampilan bagi pemuda | Persentase pemuda yang telah dilatih ketrampilan | % | % | 300 | |
| 16 | Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. | | | | | | Dinas |
| | - Pemberian Penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda. | Terlaksananya penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda | Persentase pengguna nar- koba di kalangan generasi muda | % | % | 350 | Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |
| 17 | Pengembangan Kebijakan dan Manajemen olahraga | | | | | | Dinas |
| | - Pengembangan perencanaan olahraga terpadu. | Tersusunnya perencanaan olahraga terpadu | Adanya perencanaan olahraga terpadu | | Ada | 400 | Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan |
| | - Penyusunan pola kemitraan dan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan industri olahraga. | Terciptanya pola kemitraan masyarakat dalam pem- angunan dan pengembang industri olahraga | Adanya pola kemitraan masyarakat dalam pem- angunan dan pengembangan industri olahraga | | Ada | 400 | Olahraga |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|---|---|--|--------|------|---|---|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18 | Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga. | | | | | | Dinas |
| | - Pefaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah | Terlaksananya identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah | meningkatnya prestasi olah- raga unggulan daerah | % | % | 350 | Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |
| | - Penyelenggaraan Kompetisi olah raga | Terselenggarakannya kompetisi olahraga | Jumlah kompetisi olahraga yang diselenggarakan | 6 | 15 | 500 | |
| | - Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pendanaan dan pembinaan olah raga | Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pendanaan dan pembinaan olahraga | Persentase organisasi masya- rakat dan dunia usaha yang berperan aktif dalam pendana- an dan pembinaan olahraga | % | % | 250 | |
| 19 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah raga. | | | | | | Dinas |
| | - Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga. | Terciptanya kerjasama pola kemitraan antara pemerin- tah dan masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga | Adanya kerjasama pola kemitraan antara pemerin- tah dan masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga | | Ada | 400 | Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |

**RENCANA TINDAK PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN
RPJMD KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2010 - 2015**

Misi 6 : Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat

BIDANG : Ekonomi

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|---|---|--|--------|------|--|---------------------------|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan | | | | | | Badan Pemberdayaan Masyrk |
| | - Pelatihan ketrampilan usaha budidaya tanaman; | - Dilaksanakannya pelatihan budidaya tanaman | Persentase masyarakat desa yang dilatih | % | % | 500 | Perempuan dan KB |
| | - Pelatihan ketrampilan Manajemen badan usaha Milik Desa | Dilaksanakannya pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa | Persentase masyarakat desa yang dilatih | % | % | 200 | |
| | - Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan. | Dilaksanakannya pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan | Persentase Jumlah industri kerajinan yang dilatih | % | % | 200 | |
| | - Pelatihan ketrampilan usaha pertanian dan peternakan. | Dilaksanakannya pelatihan ketrampilan usaha pertanian dan peternakan | Persentase Jumlah petani dan peternak yang dilatih | % | % | 200 | |
| | - Fasilitasi permodalan bagi usaha kecil dan menengah di pedesaan; | Terciptanya fasilitas permodalan bagi usaha kecil dan menengah di pedesaan | Adanya fasilitas permodalan bagi usaha kecil dan menengah di pedesaan | Ada | Ada | 300 | |
| | - Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan. | Terciptanya fasilitas kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan | Adanya fasilitas kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan | Ada | Ada | 300 | |

**RENCANA TINDAK PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN
RPJMD KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2010 - 2015**

Misi 6 : Meningkatkan partisipasif aktif masyarakat

BIDANG : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Ruplah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|---|---|--|--------|------|--|--|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan | | | | | | |
| | - Pelatihan ketrampilan usaha budidaya tanaman; | - Dilaksanakannya pelatihan budidaya tanaman | Persentase masyarakat desa yang dilatih | % | % | 500 | Badan Pemberdayaan Masyrk Perempuan dan KB |
| | - Pelatihan ketrampilan Manajemen badan usaha Milik Desa | Dilaksanakannya pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa | Persentase masyarakat desa yang dilatih | % | % | 200 | |
| | - Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan. | Dilaksanakannya pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan | Persentase Jumlah industri kerajinan yang dilatih | % | % | 200 | |
| | - Pelatihan ketrampilan usaha pertanian dan peternakan. | Dilaksanakannya pelatihan ketrampilan usaha pertanian dan peternakan | Persentase Jumlah petani dan peternak yang dilatih | % | % | 200 | |
| | - Fasilitasi permodalan bagi usaha kecil dan menengah di pedesaan; | Terciptanya fasilitas permodalan bagi usaha kecil dan menengah di pedesaan | Adanya fasilitas permodalan bagi usaha kecil dan menengah di pedesaan | Ada | Ada | 300 | |
| | - Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan. | Terciptanya fasilitas kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan | Adanya fasilitas kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan | Ada | Ada | 300 | |

**RENCANA TINDAK PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN
RPJMD KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2010 - 2015**

Misi 6 : Meningkatkan partisipasif aktif masyarakat

BIDANG : Ilmu Pengetahuan dan IPTEK

SEKTOR : Pemuda dan Olah Raga

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN (Satuan) | TARGET | | TOTAL ALOKASI ANGGARAN 2011-2015 (Juta Rupiah) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|--|--|---|--------|------|---|---|
| | | | | 2011 | 2015 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah raga. | | | | | 150 | Dinas Kebudayaan, Pariwisaa, Pemuda dan Olah Raga |
| | Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK olahraga sebagai pendorong peningkatan presasi olahraga | - Tersedianya IPTEK Olahraga sbg pendorong peningkatan prestasi olah raga | Meningkatnya prestasi olah- raga, dengan meningkatnya jumlah medali yang diraih | % | % | | |
| 2 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah raga. | | | | | 150 | Dinas Kebudayaan, Pariwisaa, Pemuda dan Olah Raga |
| | Pengembangan dan pemanfaatan iptek dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga. | - Tersedianya kemudahan teknologi (Akses Jaringan) dalam pengembangan sarana dan prasarana | Meningkatnya prestasi olah- raga, dengan meningkatnya jumlah medali yang diraih | % | % | | |